

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI  
EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI KINERJA PEMERINTAHAN DI  
KELURAHAN SIDORAME BARAT I**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat*

*Memproleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)*



**OLEH**

<b>Nama</b>	<b>: Diah Syafitri</b>
<b>NPM</b>	<b>1905170131</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Akuntansi</b>
<b>Konsentrasi</b>	<b>: Akuntansi Sektor Publik</b>

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 15 Agustus 2023, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : DIAH SYAFITRI  
N P M : 1905170131  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Skripsi : ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI KINERJA PEMERINTAHAN DI KELURAHAN SIDORAME BARAT I

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si)

Penguji II

(M. FAHMI PANJAITAN, SE., M.Si, Ak., CA., aCPA)

Pembimbing

(Dr. WIDIA ASTUTY, SE., M.Si, Ak., CA., CPA., QIA)

**PANITIA UJIAN**

Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : DIAH SYAFITRI

N.P.M : 1905170131

Program Studi : AKUNTANSI

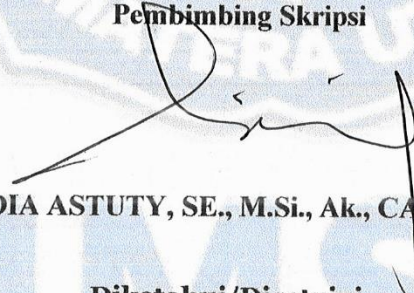
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Judul Skripsi : ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI  
EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI KINERJA PEMERINTAHAN  
DI KELURAHAN SIDORAME BARAT I

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, 11 Juli 2023

Pembimbing Skripsi



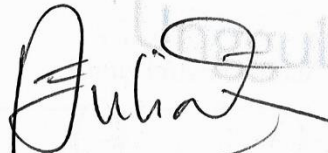
(Dr. WIDIA ASTUTY, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., QIA)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



oc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Lengkap** : Diah Syafitri  
**NPM** : 1905170131  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Konsentrasi** : Akuntansi Sektor Publik  
**Nama Dosen Pembimbing** : Dr. Widia Astuty, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., QIA.  
**Judul Penelitian** : Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintahan Di Kelurahan Sidorame Barat I

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Latar belakang masalah di paragraf 22/5-2023 - tambahkan kutipan literatur	22/5-2023	
Bab 2	Kerangka konseptual skripsi	29/5-2023	
Bab 3	lengkapi metode penelitian.	30/5-2023	
Bab 4	Deskripsi data sekunder layer 5/6-2023 Jaka pembahasan ditambahkan.	5/6-2023	
Bab 5	Perbaiki kesimpulan dan sum	5/6-2023	
Daftar Pustaka	Tambahkan literatur terbaru yang relevan	3/7-2023	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- Selesai bimbingan - Skripsi - Sajikan, melaujutkan kesidang Meja Hijau	11/7-2023	

Medan, 11 Juli 2023

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum SE., M.Si)

(Dr. Widia Astuty, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., QIA.)

**SURAT PERNYATAAN**  
**PENELITIAN/SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diah Syafitri  
NPM : 1905170131  
Fak/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi  
Judul Penelitian : Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintahan Di Kelurahan Sidorame Barat I

Menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
  - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
  - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/Makalah/Skripsi dan Penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Agustus 2023

Pembuatan Pernyataan



**DIAH SYAFITRI**

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi pada saat pengajuan judul.
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

## ABSTRAK

### **Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintahan Di Kelurahan Sidorame Barat I**

**Diah Syafitri**

**Program Studi Akuntansi**

**Email : [syafitridiah120@gmail.com](mailto:syafitridiah120@gmail.com)**

Penyerapan realisasi anggaran harus seratus persen (100%) agar tidak terjadi surplus atau defisit tanpa memperhatikan efektivitas dan efisiensi, diterapkanlah anggaran berbasis kinerja yang ditujukan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan anggaran berbasis kinerja menggambarkan tujuan dan sasaran dana yang diminta, besarnya biaya-biaya yang diperlukan untuk menjalankan program yang dapat mengukur pencapaian program yang akan dilaksanakan. Pengelolaan anggaran di Kelurahan Sidorame Barat I masih dapat dikatakan belum efektif dan efisien dikarenakan penganggaran berbasis kinerja ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan dan penyeimbangan saja tetapi juga didasarkan pada tujuan tertentu yang pelaksanaannya berfokus pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu program kegiatan.

Tujuan Penelitian ini untuk (1) Untuk mengetahui kinerja pemerintah Kelurahan Sidorame Barat I dalam pengelolaan realisasi anggaran belanja periode 2021-2022 (2) Untuk menilai efektivitas dan efisiensi terlaksananya program dan kegiatan yang sumber pembiayaannya dari Anggaran periode 2021-2022

Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menghitung perkembangan efektivitas dan efisiensi laporan realisasi anggaran Kelurahan Sidorame Barat I. Pemilihan subjek dari penelitian adalah Sekretaris Kelurahan Sidorame Barat I, Kasi Pembangunan Masyarakat yang terlibat dalam penyusunan anggaran belanja. Objek dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran periode 2021-2022.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Kinerja Pemerintah Kelurahan Sidorame Barat I melakukan optimalisasi anggaran secara efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan realisasi anggaran tahun anggaran 2021-2022 sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2) Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan di Kelurahan Sidorame Barat I tahun anggaran 2021-2022 dapat dikatakan sangat efektif yaitu memiliki rasio efektivitas rata-rata 183, 53% (3) Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan di Kelurahan Sidorame Barat I tahun anggaran 2021-2022 dapat dikatakan tidak efisien yaitu memiliki rata-rata diatas 100%.

**Kata Kunci : Kinerja pemerintahan Kelurahan Sidorame Barat I, Anggaran, Efektivitas, Efisiensi.**



## ABSTRACT

### **Budget Realization Analysis to Assess the Effectiveness and Efficiency of Government Performance in Sidorame Barat I Village**

**Diah Syafitri**  
**Accounting Study Program**  
**Email : [syafitridiah120@gmail.com](mailto:syafitridiah120@gmail.com)**

Absorption of budget realization must be one hundred percent (100%) so that there is no surplus or deficit regardless of effectiveness and efficiency, a performance-based budget is applied which is aimed at increasing the effectiveness and efficiency of budget use and the implementation of performance-based budget activities describing the goals and objectives of the funds requested, the amount of costs -costs required to run the program that can measure the achievement of the program to be implemented. Budget management in Sidorame Barat I Village can still be said to be ineffective and efficient because performance-based budgeting is not only based on needs and balancing but also based on certain objectives whose implementation focuses on the effectiveness and efficiency of implementing an activity program.

The aims of this study were (1) to find out the performance of the West Sidorame I Village government in managing the realization of the 2021-2022 period budget (2) to assess the effectiveness and efficiency of the implementation of programs and activities whose sources of financing are from the 2021-2022 period budget.

This research uses quantitative with a descriptive approach. By calculating the development of the effectiveness and efficiency of the budget realization report for Kelurahan Sidorame Barat I. The subject of the research was the Secretary of Kelurahan West Sidorame I, Head of Community Development Section who was involved in preparing the budget. The object of this research is the Budget Realization Report for the 2021-2022 period.

The conclusions of the results of this study are (1) The performance of the West Sidorame Sub-District Government I optimizes the budget effectively and efficiently in managing the realization of the 2021-2022 budget in accordance with Law Number 21 of 2011 concerning Regional Financial Management (2) The level of effectiveness of financial management in Sidorame Barat I Village I for the 2021-2022 fiscal year it can be said to be quite effective, namely it has an average effectiveness ratio of 183,53% (3) The efficiency level of financial management in Sidorame Barat I Village for the 2021-2022 fiscal year can be said to be quite efficient, namely it has an average 100%.

**Key Words : Government performance of West Sidorame Village I, Budget, Effectiveness, Efficiency.**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh**

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, barokah, serta besarnya karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW, Semoga penulis serta pembaca selalu berada di dalam naungan safa'atnya yang hingga akhir zaman nanti, Aamiin ya robbal'alamin.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Kelurahan Sidorame Barat I.”**

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, dan doa yang tidak pernah tinggal dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, yang selalu memberikan karunia-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yang dicintai oleh Allah SWT, . Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Suyadi dan Ibunda Meliana Nasution yang telah memberikan kasih yang tak terhingga sepanjang masa, membesarkan, mendidik serta memberikan



bimbingan, nasihat, dan doa yang tulus setiap harinya sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini dengan semaksimalnya.

1. Bapak Prof. Dr.. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Januri, S.E, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Widia Astuty, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., QIA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan bantuan dengan hati yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Pendidikan dan pengarahan selama dibangku kuliah.
9. Dio Syahputra selaku adik kandung yang penulis sayangi.

10. Terimakasih kepada sahabat terdekat saya dikampus yang terus mau berjuang Bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini Dini Putri Sari Simatupang, Dita Aulia, dan Rika Rahmawati Br Brutu.
11. Terimakasih kepada teman penulis Meliyarni Tanjung dan Nurhalimah yang membantu mengurus data dan menemani saat pengerjaan skripsi.
12. Terimakasih kepada teman-teman stambuk 2019 Akuntansi yang selalu memberikan dukungan, dorongan, dan menghibur saya selama kuliah.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran yang bersifat membangun dari pembaca, dengan hati yang terbuka serta pemikiran yang jernih penulis terima.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap skripsi ini akan menjadi salah satu dokumen penting untuk perkembangan dunia kerja dimasa yang akan datang.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh**

Medan, 11 Juli 2023

Penulis,

Diah Syafitri  
1905170131

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	7
2.1.1 Pengertian APBD .....	7
2.1.2 Fungsi APBD .....	7
2.1.3 Proses Penyusunan dan Pendapatan APBD .....	8
2.2 Anggaran Sektor Publik .....	8
2.2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik.....	8
2.2.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik.....	9
2.2.3 Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik .....	11
2.2.4 Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik.....	12
2.3 Realisasi Anggaran .....	14
2.3.1 Pengertian Realisasi Anggaran.....	14
2.3.2 Struktur Laporan Realisasi Anggaran.....	14
2.3.3 Tujuan Realisasi Anggaran.....	17
2.4 Indikator Kinerja .....	17
2.4.1 Pengertian Indikator Kinerja .....	17
2.4.2 Manfaat Pengukuran Pengukuran Kinerja .....	18



2.5 Efektivitas dan Efesiensi .....	19
2.5.1 Pengertian Efektivitas .....	19
2.5.2 Efesiensi .....	20
2.6 Penelitian Terdahulu .....	21
2.7 Kerangka Berpikir .....	25
<b>BAB III Metode Penelitian .....</b>	<b>29</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	29
3.2 Definisi Operasional.....	29
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.5 Teknik Analisis Data .....	33
<b>BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.....</b>	<b>35</b>
4.1 Deskripsi Data .....	35
4.2 Analisis Data .....	37
4.2.1 Analisis Efektivitas.....	37
4.2.2 Analisis Efesiensi .....	38
4.3 Pembahasan.....	45
4.3.1 Analisis Penyebab Anggaran Belanja Kurang Efektif dan Efisien .....	47
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>50</b>
5.1 Kesimpulan .....	50
5.2 Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>54</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Dana Kelurahan Sidorame Barat I.....	4
Tabel 1.2 Daftar Wawancara Tentang Efektivitas dan Efisiensi.....	59
Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas .....	19
Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi .....	20
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Wawancara .....	30
Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian.....	31
Tabel 3.3 Kriteria Efektivitas Belanja.....	33
Tabel 3.4 Kriteria Tingkat Efisiensi Belanja Secara Umum .....	34
Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Dana Kelurahan Sidorame Barat I Thn 2021 .....	35
Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Dana Kelurahan Sidorame Barat I Thn 2022.....	36
Tabel 4.3 Perkembangan Tingkat Efektivitas.....	40
Tabel 4.4 Perkembangan Tingkat Efisiensi .....	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	27
Gambar 2.2 Struktur Organisasi .....	55
Gambar 4.1 Kenaikan/Penurunan Tingkat Efektivitas .....	41
Gambar 4.2 Kenaikan/Penurunan Tingkat Efesiensi.....	44



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik yang ada di negara kita, dari tahun ke tahun mulai meningkat dengan adanya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Untuk saat ini akuntansi sektor publik banyak digunakan oleh lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah dan organisasi publik lainnya. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh besar bagi nasib suatu daerah karena bisa menjadi daerah yang kuat dan mampu mengembangkan kinerja dalam mengelola keuangan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar bisa mengurangi pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia, maka pengelolaan daerah harus dilaksanakan secara efektif, transparansi, akuntabilitas dan adil. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menggambarkan pembiayaan pemerintah terhadap kegiatan pelaksanaan dan pembangunan. (Sella R, 2018)

Masyarakat menuntut pemerintah yang bersih atau yang dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangannya. Anggaran yang dikelola oleh organisasi sektor publik harus menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas yang menjadi indikator kinerja keuangan suatu entitas `sektor publik. Pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dalam memenuhi kewajiban serta komitmennya, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi , dan menyediakan informasi, serta keseluruhan yang berguna (Bastian, 2006).

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang “pemerintah daerah kelurahan, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah”.

Pada prinsipnya anggaran atau yang biasa kita sebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah gambaran dari kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam ukuran uang, yang meliputi kebijakan penerimaan pemerintah daerah serta realisasi anggaran tahun yang lalu. Dalam prakteknya, anggaran sering tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Penyusunan dan alokasi anggaran sering mengabaikan prinsip keadilan sosial. Hal itu ditandai oleh alokasi anggaran bagi pejabat yang jauh lebih besar dibandingkan anggaran untuk kepentingan public. Disinilah letak urgensi mengapa advokasi anggaran perlu dilakukan, agar anggaran benar-benar ditempatkan sebagaimana fungsi yang seharusnya. (Hanum Z, 2011).

DAU adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemda, dan pemda secara leluasa dapat menggunakan DAU apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standard kehidupan masyarakat. (Ubar Harahap, 2011)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan ini menjadi salah satu Laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran pemerintahan adalah tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran ini mempunyai peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik,

perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja (Sinambela E, 2018).

Efektivitas adalah suatu kegiatan atau aktivitas perlu diperhatikan tentang pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata (Abdullah I, 2016) . Sasaran anggaran yang jelas dan spesifik dan jelas tidak hanya terbatas kepada kesepakatan tujuan yang telah berhasil dirumuskan (Astuty W, 2012)

(Badan Pemeriksa Keuangan, 2017) “Pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan efisien dan efektif harus dilakukan secara maksimal, karena hal ini berkaitan dengan target dan realisasi penerimaan daerah, dan ternyata realisasi seringkali tidak sesuai dengan target, disini timbul pertanyaan mengapa demikian? Kalau pengelolaan keuangannya sudah efisien dan efektif ini berarti bahwa adanya suatu jaminan ketersediaan dana pembangunan, dan kalau pengelolaannya belum efisien dan efektif maka perlu untuk didorong atau digenjot lagi agar supaya pengelolaannya akan lebih membaik. Pendapatan asli daerah merupakan indikator kemandirian suatu daerah. Artinya semakin meningkatnya proporsi penerimaan PAD terhadap keseluruhan penerimaan pendapatan daerah yang ditunjukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah tersebut menunjukkan kemandirian dalam hal pembiayaan pembangunan daerahnya”

Penganggaran dana untuk kelurahan pada 2021 berbeda dibandingkan dengan tahun lalu. Pada tahun lalu, pemerintah memutuskan mengalokasikan dana kelurahan secara tersendiri, walaupun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aparat pemerintah kota. Saat itu, dana kelurahan bersumber dari APBD dan DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan.( Permendagri No. 130 Tahun 2018).

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. (Permendagri 31, 2006)



**Tabel 1.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Dana Kelurahan Sidorame Barat I**  
**T.A 2021-2022**

(Dalam Ribuan)

<b>Tahun</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>	<b>Persentase (%)</b>
2021	Belanja Keseluruhan	Rp.1.109.734.737	Rp.882.579.479	Rp. 227.155.258	179,53%
2022	Belanja Keseluruhan	Rp.460.407.074	Rp.406.197.848	Rp. 54.209.226	188,22%

Sumber : Data Diolah Penulis, 2023

Berdasarkan data diatas yang tertuang dalam tabel 1.1 menunjukkan bahwa anggaran belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini terlihat pada tahun 2021 realisasi anggaran belanja sebesar 179,53%. Pada tahun 2022 realisasi anggaran sebesar 188,22%

Pengalokasian anggaran di Kelurahan Sidorame Barat I. Dalam realisasi anggaran dana Kantor Lurah Sidorame Barat I terlihat dari instansi kinerjanya kurang efektif sehingga memungkinkan penggunaan anggaran pada Kantor Lurah Sidorame Barat I menurun. Hal tersebut mengungkapkan bahwa kegiatan pada masing-masing bidang kurang dipersiapkan dengan pelaksanaan metode dan teknis penilaian dalam monitoring dan evaluasi anggaran Kelurahan Sidorame Barat I (Waspada.id, 2022) .

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah di Kelurahan Sidorame Barat I.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang diatas adapun identifikasi masalahnya adalah Anggaran Dana Kelurahan Sidorame Barat I T.A 2021 masih belum sepenuhnya terealisasi hal ini menunjukkan kinerja instansinya yang kurang efisien

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana tingkat efektifitas dan efesiensi pada anggaran dana kelurahan sidorame barat I T.A 2021-2022 ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat maka tujuan penelitian adalah Penelitian ini bertujuan untuk “menganalisis tingkat efektif dan efesien Kelurahan Sidorame Barat I dalam merealisasikan anggaran dana kelurahan

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat diberikan kepada beberapa pihak antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber bacaan maupun referensi bagi penggunaannya sebagai sumber informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktisi

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan, pengalaman serta pengetahuan khususnya tentang mengenai anggaran dan realisasi sebagai efektivitas dan efesiensi kinerja pemerintah.

2) Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan pertimbangan mengenai kebijaksanaan yang akan di ambil dalam menentukan anggaran pada tahun yang akan datang dan mampu untuk menganalisis kelayakan suatu penyusunan anggaran yang telah ditetapkan.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

##### **2.1.1 Pengertian APBD**

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 (Pemda, 2014), “Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”. APBD adalah suatu rencana yang diungkapkan dalam bentuk kuantitatif yang biasanya berhubungan dengan keuangan (Mardiasmo, 2013).

Menurut (Permendagri, No. 21 Tahun 2011), APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Selain itu membantu mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, serta otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang”.

##### **2.1.2 Fungsi APBD**

Pada Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Thn 2006 menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi Otorisasi , Anggaran daerah tersebut menjadi dasar untuk dapat melaksanakan pendapatan serta belanja daerah ditahun bersangkutan
- b. Fungsi Perencanaan, Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman bagi manajemen didalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi Pengawasan , Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

- d. Fungsi Alokasi , Anggaran daerah tersebut harus diarahkan untuk dapat menciptakan lapangan kerja atau juga mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya, dan juga meningkatkan efisiensi & efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi Distribusi , Anggaran daerah tersebut harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatutan.
- f. Fungsi Stabilisasi, Anggaran daerah tersebut menjadi alat untuk dapat memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu daerah.

### **2.1.3 Proses Penyusunan Dan Penetapan APBD**

Menurut (Permendagri No. 58 Tahun 2005) tentang pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.
- b. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran.
- c. Penetapan prioritas, dan plafon anggaran sementara.
- d. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD
- e. Penetapan APBD

## **2.2 Anggaran Sektor Publik**

### **2.2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik**

“Anggaran sektor publik adalah instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang public (Mardiasmo, 2013). Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang (Nafarin, 2012). Sedangkan pengertian anggaran menurut ”Commite on Governmental Accounting” yang dikutip oleh (Haruman, 2010) anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu”.

Menurut (Indra Bastian, 2010) Anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.
- b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satuan atau beberapa tahun.
- c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- d. Usulan anggaran telah disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- e. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu

### **2.2.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik**

Menurut (Heldawati, 2021) Fungsi anggaran sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan, Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :
  - a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
  - b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya
  - c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
  - d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi
2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control Tool), Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu:
  - a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan.
  - b. Menghitung selisih anggaran (favourable dan unfavourable variances).
  - c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan tak dapat dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varians.
  - d. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.
  - e. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

### 3. Anggaran Sebagai Alat Politik (Political Tool)

Dalam pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition building, keahlian berlembaga dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para pimpinan publik.

### 4. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and Communication Tool).

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu memprediksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan lembaga atau instansi.

### 5. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (Performance Measurement Tool)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja pimpinan publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai, dihubungkan dengan anggaran yang disepakati.

### 6. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool).

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi pimpinan dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan lembaga yang telah disepakati. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achievable maksudnya target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

### 1. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (Public Share)

Fungsi ini hanya berlaku pada lembaga swasta anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup untuk publik. Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya non publik, seperti LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, dan organisasi masyarakat lainnya, harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

keikutsertaan mereka dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan pembangunan maupun rencana kinerja publik (daerah), sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif (DPR/DPRD).

### **2.2.3 Jenis – Jenis Anggaran Sektor Publik**

(Halim dan Kusufi, 2016) dalam menyusun anggaran terdapat dua pendekatan, yaitu:

#### **1. Pendekatan Tradisional**

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang. Adapun ciri-ciri anggaran dengan pendekatan tradisional yaitu:

- a. Cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism.
- b. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item.
- c. Cenderung sentralistis.
- d. Bersifat spesifikasi.
- e. Tahunan.
- f. Menggunakan prinsip-prinsip anggaran bruto.

#### **2. Pendekatan New Public Management**

New public management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja bukan pada kebijakan. Paradigma new public management telah melahirkan beberapa teknik penganggaran dalam sektor publik, yaitu:

##### **a. Anggaran Kinerja (Performance Budgeting)**

Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan.

b. Anggaran Program (Program Budgeting)

Metode ini menekankan bahwa keputusan penganggaran harus didasarkan pada tujuan-tujuan dari aktivitas pemerintahan daripada input untuk menghasilkan barang dan jasa pemerintah.

c. Anggaran Berbasis Nol (Zero Based Budgeting-ZBB)

Penyusunan anggaran ini dapat mengatasi kelemahan pendekatan incrementalism dan line-item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero-based), tidak berdasarkan pada tahun lalu tapi berdasarkan kebutuhan saat ini.

d. Planning, Programming and Budgeting System (PPBS)

PPBS merupakan suatu anggaran di mana pengeluaran secara primer dikelompokkan dalam aktivitas-aktivitas yang didasarkan pada program kerja dan secara sekunder didasarkan pada jenis atau karakter objek dan kinerja. PPBS merupakan upaya sistematis yang memperhatikan integrasi dari perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran.

#### **2.2.4 Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik**

(Marsdiasmo dan Ayumiati, 2017) mengungkapkan bahwa proses penyusunan anggaran sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan dan penyusunan anggaran (budget preparation)

Pada tahap persiapan dan penyusunan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran. Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor “uncertainly” (tingkat ketidakpastian) yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya suatu mata anggaran sangat tergantung pada teknik dan sistem anggaran yang digunakan.



## 2. Tahap ratifikasi Anggaran

Tahap berikutnya adalah budget ratification. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksklusif (Kepala Daerah) dituntut tidak hanya memiliki “*managerial skill*” namun juga harus mempunyai “*political skill*,” “*salesmanship*” dan “*coalition building*” yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

## 3. Tahap Pelaksanaan Anggaran (budget implementation)

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang digunakan hendaknya juga mendukung pengendalian anggaran.

## 4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Apabila pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada 58 tahap pelaporan dan evaluasi anggaran biasanya tidak akan menemui banyak masalah.

## **2.3 Realisasi Anggaran**

### **2.3.1 Pengertian Realisasi Anggaran**

“Dalam bukunya yang berjudul penyusunan dan Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan. Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-perundangan”. (Gege E.P, 2011)

Menurut (Permendagri, 2013 No. 64), “Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan”.

### **2.3.2 Struktur Laporan Realisasi Anggaran**

Menurut (Permendagri, 2006 No. 13), struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

a. Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana.

#### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

a) Pajak Daerah

b) Retribusi Daerah

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang mencakup :

1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah

(BUMD)

- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN)
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
- d) Lain-lain PAD yang sah meliputi :
  - 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - 2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - 3) Jasa giro
  - 4) Pendapatan bunga
  - 5) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah
  - 6) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
  - 7) Komisi, potingan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
  - 8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
  - 9) Pendapatan denda pajak dan retribusi
  - 10) Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum
  - 11) Pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
  - 12) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2. Dana Pertimbangan , meliputi :

- a) Dana alokasi umum
- b) Dana alokasi khusus, dan
- c) Dana bagi hasil, yang meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak

3. Pendapatan Lain-Lain yang sah, meliputi :

- a) Pendapatan hibah
- b) Pendapatan dana darurat
- c) Dana bagi hasil pajak dan provinsi kepada kabupaten/kota
- d) Dana otonomi khusus

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang disajikan berdasarkan PSAP No.02 laporan realisasi anggaran menyajikan informasi yang masing-masing diperbandingkan dengan

anggarannya dalam satu periode. Dalam laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas. Struktur laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi antara lain :

a. Pendapatan

1. Pendapatan (basisi kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar lagi oleh pemerintah.

2. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

b. Belanja

1. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh Kembali oleh pemerintah.

2. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Surplus atau Defisit

Surplus atau defisit adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan Pembiayaan (Financing) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

### **2.3.3 Tujuan Realisasi Anggaran**

“Pengelola realisasi anggaran harus membantu memutuskan produk atau layanan jasa apa saja yang diberikan, apa yang diprioritaskan dalam organisasi, apa tujuan kualitasnya dan bagaimana mengelola sumber dayanya”. (Bastian. 2011)

## **2.4 Indikator Kinerja**

### **2.4.1 Pengertian Indikator Kinerja**

“Menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan”.(Mahmudi, 2015)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk menilai kinerja yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan.

(Indra, 2006) Menjelaskan bahwa ada enam aspek yang digunakan untuk mengukur kinerja:

#### 1. Aspek finansial

Aspek finansial meliputi anggaran atau cash flow. Aspek finansial ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja, sehingga kondisi keuangan dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia.

#### 2. Kepuasan pelanggan

Dalam globalisasi perdagangan. peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi perusahaan. Untuk itu, manajemen perlu memperoleh informasi yang relevan mengenai tingkat kepuasan pelanggan.

#### 3. Operasi dan bisnis internal

Informasi operasi bisnis internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum dalam skema strategi. Disamping itu, informasi operasi bisnis internal juga diperlukan untuk melakukan perbaikan terus menerus atau efisiensi dan efektifitas operasi perusahaan,

#### 4. Kepuasan pegawai

Dalam perusahaan yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai sungguh sangat nyata. Apabila pegawai tidak dikelola dengan baik, maka kehancuran perusahaan sulit untuk dihindari.

#### 5. Kepuasan komunitas dan sharenholders/stakeholders

Pengukuran kinerja perlu didesain untuk mengakomodasikan kepuasan dari para stakeholders.

#### 6. Waktu

Ukuran waktu juga merupakan variabel yang perlu diperhatikan dalam desain pengukuran kinerja, sehingga informasi yang dibutuhkan diharapkan relevan dan up to date.

### **2.4.2 Manfaat Pengukuran Kinerja**

Menurut (Yuwono, 2008) manfaat sistem pengukuran kinerja yang baik yaitu :

1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang yang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberikan kepuasan pelanggan.
2. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai mata rantai pelanggan dan pemasok internal.
3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut (reduction of waste).
4. Membuat tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.
5. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi “reward” atas perilaku yang diharapkan tersebut.



## 2.5 Efektivitas dan Efisiensi

### 2.5.1 Pengertian Efektivitas

Menurut (Mardiasmo, 2017) Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

(Makmur, 2011) Mengungkapkan Indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas kinerja pemerintah, sebagai berikut :

- a. Ketepatan waktu
- b. Ketepatan perhitungan biaya
- c. Ketepatan dalam pengukuran
- d. Ketepatan dalam menentukan pilihan.
- e. Ketepatan berpikir

Berikut formula untuk mengukur tingkat efektifitas anggaran belanja:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 2016. Kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja dapat dilihat pada tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Efektivitas**

Presentase Pengukuran	Kriteria Efektivitas
100% keatas	Sangat Efektif
90% sampai 100%	Efektif
80% sampai 90%	Cukup Efektif
60% sampai 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber.: Kepmendagri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016

### 2.5.2 Efisiensi

“Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan perhitungan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah dilihat dari sisi pengeluaran formula perhitungannya antara penerimaan daerah dengan belanja rutin. Suatu kerja organisasi atau pemerintah dikatakan efisien apabila mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, produktifitas, performance, dibanding masukan-masukan yang berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu yang digunakan. Dengan kata lain, meminimumkan biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan , atau sebaliknya disebut efisien. apabila dapat memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas”. ( Mardiasmo, 2010)

Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input yang terenda. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input yang dihasilkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. (Haryanto,2007)

Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690. 900-327 Tahun 2016, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Efisiensi**

<b>Presentasi Pengukuran</b>	<b>Kriteria Efisiensi</b>
100% keatas	Tidak Efisien
90% sampai 100%	Kurang Efisien
80% sampai 90%	Cukup Efisien
60% sampai 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016

Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya (input) minimal diperoleh hasil (output) yang diinginkan (Bastian, 2006). Indikator penentu efisiensi kinerja pemerintah daerah adalah :

- a) Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- b) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
- c) Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- d) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat
- e) Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang relevan dan biasanya digunakan untuk membandingkan antara penelitian yang dibuat dengan penelitian orang lain. Penelitian tentang kinerja realisasi anggaran telah banyak mengalami perkembangan. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan dan efektifitas dan efisiensi kinerja . Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, ada faktor-faktor yang berpengaruh positif namun ada juga yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja realisasi anggaran

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun Peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam beberapa jurnal terkait dengan penelitian ini. (Randi, 2018)

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul	Sumber	Hasil Penelitian
1.	Sella Ria Purwanti (2018)	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Pada Kantor Kelurahan Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung periode 2013-2017	Jurnal penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri	Kinerja Pemerintah Kelurahan Kutoanyar melakukan optimalisasi anggaran secara efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan realisasi anggaran tahun anggaran 2013-2017 sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan di Kelurahan Kutoanyar tahun anggaran 2013-2017 dapat dikatakan efektif yaitu memiliki rasio efektivitas rata-rata 97,98%. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan di Kelurahan Kutoanyar tahun anggaran 2013-2017 dapat dikatakan efisien yaitu memiliki rata-rata 87,47%
2.	Heldawati (2021)	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintahan Kabupaten Luwu	Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Realisasi Anggaran Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu di katakan Baik dikarenakan data-data yang di olah secara olah sekunder memberikan hasil yang baik pula.

3.	Lince Liling (2022)	Analisis Anggaran Dan Realisasi Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Desa Makkodo Kecamatan Simbuang Kabupaten Tana Toraja	Jurnal Penelitian Universitas Bosowa Makassar	Berdasarkan hasil perhitungan anggaran mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan belanja anggaran setiap tahunnya kriteria berjalan cukup efektif. Dikatakan cukup efektif karena berdasarkan perhitungan tahun 2019-2021 memiliki rasio efektivitas rata-rata 99% hal ini dikarenakan masih adanya pemborosan dan tidak teliti dalam mempertimbangkan alokasi keuangan yang ditujukan untuk membiayai pembangunan sehingga pencapaian sasaran masih belum optimal.
4.	Kiky Muryanti (2015)	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Periode 2011-2015	Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2011-2015 dapat dikatakan sangat efektif, yaitu dengan memiliki rasio efektivitas rata-rata di atas 100%, sedangkan perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2011-2015

				dapat dikatakan efisien
5.	Rusmilawati (2021)	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kantor Kelurahan Di Kecamatan Banjarmasin Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2016 – 2018	Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin	Secara keseluruhan hasil perhitungan efektivitas kinerja kantor Kelurahan Di Kecamatan Banjarmasin Tengah Provinsi Kalimantan Selatan periode tahun 2016 – 2018 sudah efektif karena hasil yang di capai 90% keatas. Sedangkan untuk hasil perhitungan efisiensi kinerja kantor Kelurahan Di Kecamatan Banjarmasin Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 sampai tahun 2017 sudah sangat efisien karena hasil yang di capai kurang dari 60%. Untuk hasil perhitungan efisiensi tahun 2018 sudah sangat efisien
6.	Suyatman (2020)	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Pada Kantor Kelurahan Kasiguncu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso	Jurnal Penelitian Universitas Sintuwu Maroso	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahun 2017, 2018 dan 2019 tingkat efektifitas pendapatan pada kelurahan Kasiguncu termasuk pada kategori efektif dimana hasil perbandingannya diperoleh sebesar 100%. diperoleh antara 90% - 100%.



7.	Mila Naffa Litauji (2021)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Minilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Kecamatan Kramat.	Jurnal Penelitian Politeknik Tegal	Hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat dan kriteria efektivitas Tahun Anggaran 2018-2020 cukup efektif karena penerimaan anggaran yang stabil dengan persentase sebesar 85,64
----	---------------------------	--	------------------------------------	---

## 2.7 Kerangka Berpikir

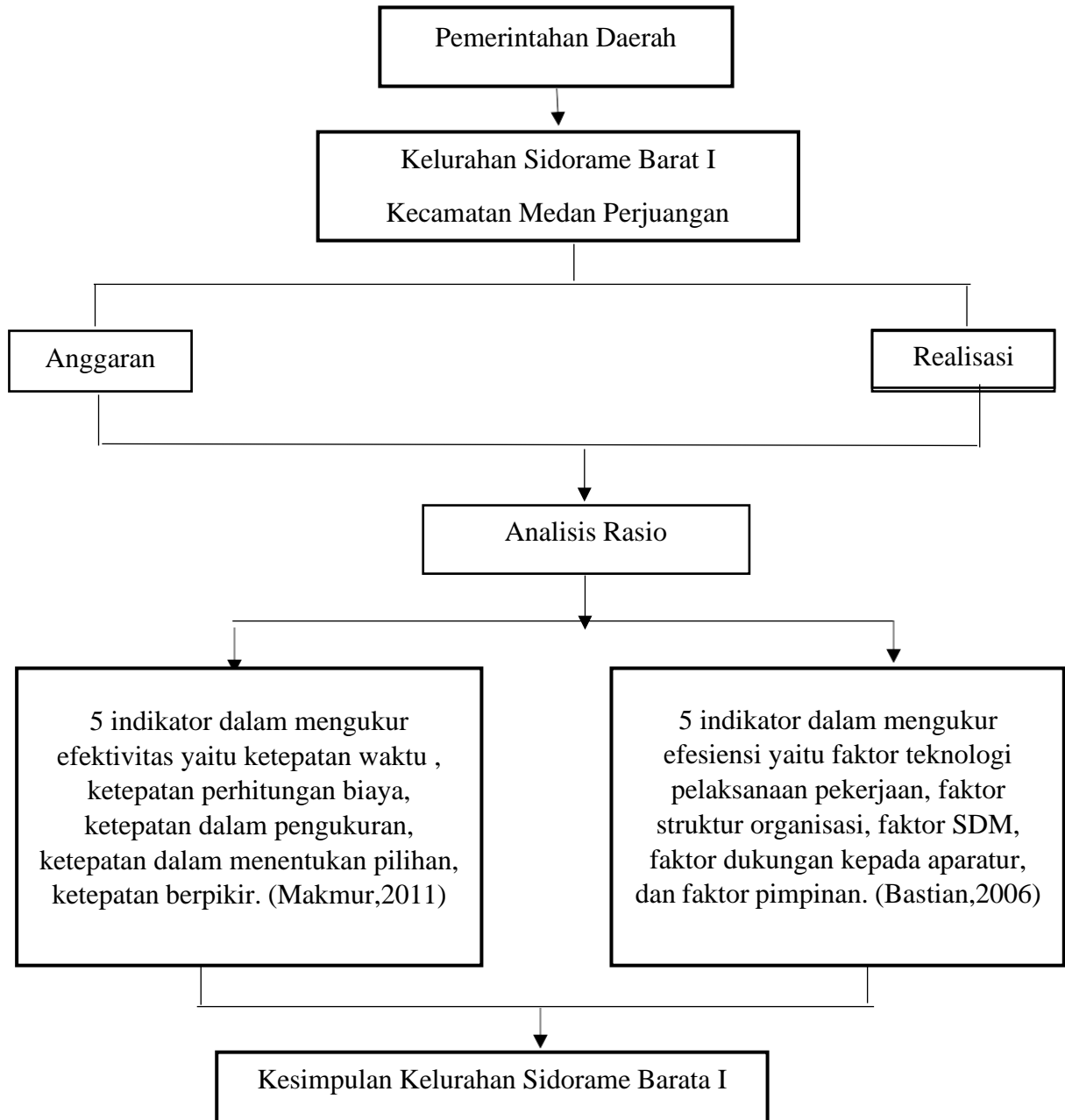
Kerangka berpikir merupakan pokok dalam penelitian dimana konsep teoritis akan berubah kedalam definisi operasional yang dapat menggambarkan rangkaian variabel yang akan diteliti. Penelitian ini akan membahas tentang permasalahan anggaran dan realisasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja. (Restia Asita, 2018)

Menurut (Permendagri No. 6 Tahun 2008) menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kelurahan adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia setelah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. (Permendagri No. 31 Tahun 2006).

Anggaran adalah suatu pendekatan sistematis untuk membantu pemerintah lebih responsif terhadap masyarakat dengan menghubungkan pendanaan program untuk kinerja dan produksi (Sony Yuwono, 2009). Realisasi Aadalah kegiatan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan anggaran (budget) (Munandar, 2012).

Dari anggaran dan realisasi diturunkan Analisis Rasio adalah suatu angka digambarkan dalam suatu pola yang dibandingkan dengan pola lainnya serta dinyatakan dalam presentase . Menurut (Halim, 2012) Rasio efektivitas merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam suatu daerah dalam mewujudkan realisasi pada pendapatan daerahnya sendiri kemudian selanjutnya akan dibagi dengan anggaran yang telah ditentukan dalam potensi nyata dalam suatu daerah. Yang memiliki 5 indikator dalam mengukur efektivitas yaitu ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, dan ketepatan berpikir (Makmur, 2011). Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. (Whenny, 2012). Memiliki 5 indikator dalam mengukur efisiensi yaitu faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan, faktor struktur organisasi, faktor SDM, faktor dukungan kepada aparatur, dan faktor pimpinan (Bastian, 2006). Dari materi diatas dapat disimpulkan bagaimana analisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi di Kelurahan Sidorame Barat I.

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dijelaskan diatas, maka kerangka pikir dalam penelitian tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



**Gambar 2.1**

**Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan Teknik penelitian deskriptif. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian dilandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada subjek atau objek tertentu (Sugiyono, 2010). Secara penelitian kuantitatif menghitung perkembangan efektivitas dan efisiensi laporan realisasi anggaran kelurahan Sidorame Barat I periode 2021-2022. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dengan cara wawancara langsung dan dokumentasi.

#### **3.2 Definisi Operasional**

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. *Independent Variable* sering disebut sebagai variabel stimulus, *predictor*, dan *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah efektifitas dan efisiensi kinerja. *Dependent Variable* sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019). Definisi Operasional adalah definisi yang dibuat spesifik sesuai dengan kriteria atau pengukuran, dibentuk dengan cara mencari indikator empiris konsep Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Efektivitas kinerja anggaran sektor publik adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Pengukuran efektivitas bisa dilakukan hanya dengan mengukur outcome. Efektivitas dalam pemerintah daerah

dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat waktu dan dalam batasan anggaran yang tersedia.

Berikut Formula untuk mengukur tingkat efektifitas anggaran belanja :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Kepmendagri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016

2) Efisiensi merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan di laksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki Secara sistematis. Efisiensi kinerja anggaran diukur dengan rasio antara output dan input. Pengukuran efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas, pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang di dihasilkan terhadap input yang digunakan.

Berikut Formula untuk mengukur tingkat efesiensi anggaran belanja:

$$\text{Efesiensi} : \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2016

**Tabel 3.1**

**Kisi – Kisi Wawancara**

No.	Variabel	Indikator
1.	Efektivitas Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan waktu dalam pengelolaan dana kelurahan.</li> <li>2. Ketepatan perhitungan biaya dalam pengelolaan anggaran dana kelurahan.</li> <li>3. Ketepatan dalam pengukuran dana kelurahan.</li> <li>4. Ketepatan dalam menentukan pilihan kegiatan dalam pengelolaan dana kelurahan.</li> <li>5. Ketepatan berpikir dalam pengelolaan dana kelurahan.</li> </ol>
2.	Efesiensi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan kelurahan.</li> <li>2. Faktor struktur organisasi dalam susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik struktural maupun fungsional kelurahan.</li> </ol>

		<p>3. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan kelurahan.</p> <p>4. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksananya baik pimpinan maupun masyarakat dalam berkegiatan.</p> <p>5. Faktor pimpinan dalam kemampuan untuk mengkombinasikan kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran kelurahan.</p>
--	--	--

### 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

#### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan Sidorame Barat I Daerah Jalan Pelita III Gang Pepaya No. 9 Medan.

#### b. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang telah direncanakan  $\pm$  6 Bulan mulai pada bulan Januari 2023 sampai Juni 2023.

**Tabel 3.2**  
**Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian**

No.	Kegiatan	Jadwal Penelitian						
		Desember 2022	Januari 2023	Februari 2023	Maret 2023	April 2023	Mei 2023	Juni 2023
1.	Pengajuan Judul							
2.	Penyusunan Proposal							
3.	Bimbingan Proposal							
4.	Seminar Proposal							
5.	Pengumpulan Data							
6.	Bimbingan Skripsi							
7.	Sidang Meja Hijau							

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini baik melalui sumber primer maupun sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Adapun alat-alat pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian lapangan adalah:

##### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang ada. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui keadaan realisasi anggaran yang ada di Kelurahan Sidorame Barat I. Dengan begitu, peneliti akan lebih mudah dalam melakukan penelitian dan belanja efektifitas dan efisiensi kinerja.

##### b. Wawancara,

adalah tanya jawab yang dilakukan dengan pemimpin perusahaan dan beberapa staf yang langsung menangani masalah laporan realisasi anggaran dana kelurahan..

##### c. Pengambilan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Dan data Sekunder Dalam hal ini Data Primer didapatkan dari kegiatan observasi dan dokumentasi secara langsung ditempat penelitian berupa Laporan Realisasi Anggaran Dana Kelurahan, dimana, penulis memperoleh data langsung pada Kelurahan Medan Perjuangan.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai (Sugiyono, 2019).



Data laporan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk realisasi anggaran yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan daerah sebagai berikut :

1. Analisis Efektivitas untuk bisa mengetahui dan mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran di kantor Kelurahan Sidorame Barat I maka dapat diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja dengan rumus:

$$\text{Efektifitas} : \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Nilai Efektivitas belanja dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

**Kriteria Efektivitas Belanja**

<b>Kriteria Efektifitas</b>	<b>Rasio Efektifitas (%)</b>
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90-99
Kurang Efektif	75-89
Tidak Efektif	<70

2. Analisis efesien belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisien anggaran jika rasio efisiennya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2007).

Efisien belanja dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efesien} : \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : (Mahmudi, 2007 :152)

**Tabel 3.4**  
**Kriteria Tingkatan Efisien Belanja Secara Umum**

Kriteria	Predikat
Sangat Efisien	< 60%
Efisien	60%-80%^
Cukup Efisien	80%-90%
Kurang Efisien	90%-100%
Tidak Efisien	>100%

Sumber : (Mohamad Mahsun : 2006. Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996).

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Meminta izin melakukan riset penelitian di kelurahan sidorame barat I.
2. Mengumpulkan data realisasi anggaran dana kelurahan periode 2021-2022.
3. Menganalisa anggaran dan realisasi pada data dana kelurahan periode 2021-2022.
4. Melakukan wawancara yang berhubungan dengan indikator efektivitas dan efisiensi kinerja.
5. Menganalisa penyebab terjadinya penurunan realisasi anggaran dan menganalisa efektivitas dan efisiensi dari data dana kelurahan.
6. Menarik Kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Data

Pada bab ini penulis menjelaskan seluruh hasil penelitian temuan saat melakukan riset di lapangan melalui hasil wawancara dan dokumentasi. Objek pada penelitian ini adalah Kelurahan Sidorame Barat I. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektif dan efisien Kelurahan Sidorame Barat I dalam merealisasikan anggaran dana kelurahan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berupa dokumen-dokumen yang ada di Kelurahan Sidorame Barat I seperti Laporan Realisasi Anggaran Kelurahan Sidorame Barat I tahun 2021-2022, data pegawai Kelurahan Sidorame Barat I, struktur organisasi yang ada di Kelurahan Sidorame Barat I.

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara Bersama sekretaris Kelurahan Sidorame Barat I dan Kasi Pembangunan.

**Tabel 4.1**

**Realisasi Anggaran Dana Kelurahan Sidorame Barat I T.A 2021**

No.	Nama Belanja/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana</b>			
1.	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Gg. Setimpal	Rp. 117.375.175	Rp. 97.031.367
2.	Rehabilitasi Jl. Gereja Gg. Halaman	Rp. 51.902.661	Rp. 43.753.866
3.	Rehabilitasi Jl. Gereja Gg. Nasional	Rp. 124.482.436	Rp. 104.574.398
4.	Rehabilitasi Jl. Gereja Gg. Pandan	Rp. 64.721.853	Rp. 54.754.914
5.	Rehabilitasi Jl. Gereja Gg. Rezeki	Rp. 61.112.375	Rp. 51.604.292
6.	Rehabilitasi Jl.. Ngalengko Gg. Senggol	Rp. 38.352.077	Rp. 32.463.349
7.	Rehabilitasi Jl. Pelita I Gg. Pinang	Rp. 64.772.326	Rp. 54.805.200
8.	Rehabilitasi Jl. Sejati Gg. Thamin	Rp. 117.116.018	Rp. 100.795.713
9.	Rehabilitasi Jl. Sejati Gg. Waspada	Rp. 52.899.816	Rp. 42.490.880
<b>Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan</b>			
1.	Belanja Bahan Lainnya	Rp. 300.000.000	Rp.190.302.750
2.	Belanja ATK Dan Dokumentasi	Rp. 67.000.000	Rp. 65.287.750
3.	Belanja Souvenir/cenderamata	Rp. 50.000.000	Rp. 44.715.000

<b>Jumlah</b>	Rp. 1.109.734.737	Rp. 882.579.479
---------------	-------------------	-----------------

Dari Tabel 4.1 menunjukkan bahwa hasil jumlah realisasi belanja keseluruhan tahun 2021 sebesar Rp. 1.109.734.737. Hasil jumlah keseluruhan anggaran belanja tahun 2021 sebesar Rp. 882.579.479. Belanja tertinggi tahun 2021 ialah banyak di perhitungkan pada biaya belanja bahan lainnya sebesar Rp. 190.302.750 yang mempunyai 9 kegiatan yaitu pelatihan barista, sosialisasi digital marketing, sosialisasi biaya narkoba, sosialisasi siskamling, sosialisasi pencegahan stunting, sosialisasi bercocok tanam hydrogel, pelatihan papan bunga, pelatihan bilal mayit, pelatihan tata rias. Dan angka anggarannya yang sebesar Rp. 300.000.000 dengan selisih sebesar Rp. 109.697.250.

**Tabel 4.2**

**Realisasi Anggaran Dana Kelurahan Sidorame Barat I T.A 2022**

No.	Nama Belanja/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana</b>			
1.	Rehabilitasi lingkungan Gang Thamrin	Rp. 145.310.000	Rp. 115.480.925
2.	Rehabilitasi Drainase Lingkungan gang pepaya	Rp. 169.350.000	Rp. 150.028.000
<b>Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan</b>			
1.	Pelatihan Tata Boga	Rp. 66.516.000	Rp. 66.130.223
2.	Sosialisasi Tentang Hukum	Rp. 17.580.000	Rp. 12.935.940
3.	Belanja Perlengkapan Posyandu	Rp. 61.651.074	Rp. 61.622.760
<b>Jumlah</b>		Rp. 460.407.074	Rp. 406.197.848

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah anggaran belanja keseluruhan tahun 2022 sebesar Rp. 460.407.074. Jumlah realisasi belanja keseluruhan tahun 2022 sebesar Rp. 406.197.848. Realisasi belanja yang tertinggi pada tahun 2022 yaitu Rehabilitasi Drainase Lingkungan Gang Pepaya sebesar Rp. 150.028.000 dan anggarannya sebesar Rp. 169.350.000. Dengan selisih Rp. 19.322.000.

## 4.2 Analisis Data

Dalam bab ini dijelaskan tentang hasil analisis data untuk mengemukakan tentang temuan atau hasil penelitian yaitu ” Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Kelurahan Sidorame Barat I. Untuk menjawab permasalahan dan untuk mencapai tujuan serta untuk menguji hipotesis penelitian ini, maka semua data tersebut diolah dengan menggunakan uji yang sudah peneliti paparkan di bab sebelumnya

### 4.2.1 Analisis Efektivitas

(Mardiasmo, 2018) mengemukakan pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas ini merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Dinilainya efektif suatu organisasi ataupun program yang dilakukan apabila output itu sendiri mampu mencapai tujuan dan dapat dikelola secara baik atau tepat.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan dengan target anggaran penerimaan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Kepmendagri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016

### 4.2.2 Analisis Efisiensi

(Mardiasmo, 2018) efisiensi adalah nerhubungan erat dengan konsep produktivitas, pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output* ). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*Spending Well*).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan REpublik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Mencantumkan pengukuran efesiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian keluaran (output) program atau capaian keluaran (output) kegiatan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian keluaran (output) program atau capaian keluaran (output) kegiatan.

Efisiensi berarti tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisisensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya, tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu, unit kerja A lebih efisisen dibandingkan unit kerja B. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya apabila lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. (Yulianti, 2015).

Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efesiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2016

#### 1. Analisis Efektivitas

Rasio efektivitas Belanja sarana dan prasarana, Belanja Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan kemampuan kelurahan dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan. Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi belanja sarana

dan prasarana dan anggaran atau target belanja sarana dan prasarana. Dan memerlukan data-data realisasi belanja pemberdayaan masyarakat dan anggaran belanja pemberdayaan masyarakat.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

TAHUN 2021

$$\text{Belanja Tahun 2021} = \frac{\text{Rp.1.992.314.216}}{\text{Rp.1.109.734.737}} \times 100\% = 179,53 \%$$

TAHUN 2022

$$\text{Belanja Tahun 2022} = \frac{\text{Rp.866.604.922}}{\text{Rp.460.407.074}} \times 100\% = 188,22 \%$$

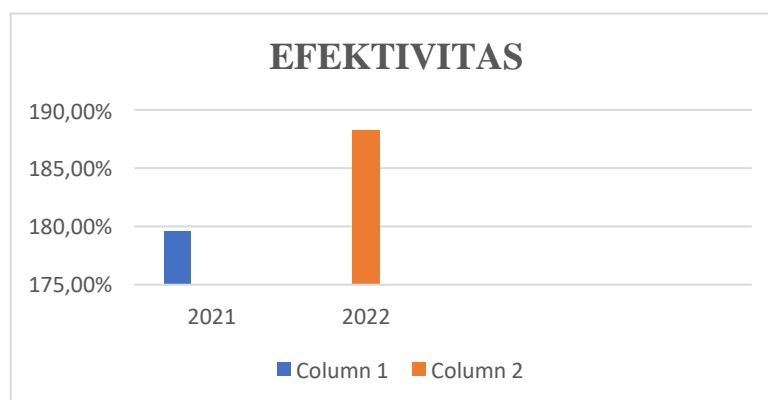
**Tabel 4.3**

Perkembangan Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kelurahan Sidorame Barat I selama tahun anggaran 2021-2022.

Tahun	Keterangan	Realisasi	Anggaran	Efektivitas (%)	Keterangan
2021	Belanja Keseluruhan	Rp. 882.579.479	Rp. 1.109.734.737	179,53%	Sangat Efektif
2022	Belanja Keseluruhan	Rp. 406.197.848	Rp. 460.407.074	188,22%	Sangat Efektif

Sumber : Data Diolah Penulis (2023)

Kenaikan/Penurunan Tingkat Efektivitas Tahun 2021-2022.



**Gambar 4.1**

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa Kelurahan Sidorame Barat I pada tahun 2021-2022 memiliki tingkat efektivitas di atas 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam mengelola anggaran daerah Kelurahan Sidorame Barat I sangat efektif, yaitu tepat pada apa yang telah menjadi target anggaran. Selama tahun 2021-2022 anggaran Belanja semakin meningkat, dengan nilai efektivitas pada tahun 2021 sebesar 179,53% dan mengalami kenaikan belanja di tahun 2022 sebesar 188,22%. . Meskipun mengalami grafik yang naik, nilai persentase efektivitas pengelolaan keuangan daerah di kelurahan sidorame barat I selama 2 tahun periode anggaran sangat efektif, yaitu dengan hasil persentase keseluruhan nilai efektivitas yang menunjukkan nilai diatas 100%.

Sesuai dengan realisasi Dana Kelurahan Sidorame Barat juga semakin naik, hal ini menjelaskan bahwa pengeluaran daerah pada tahun 2021 dan tahun 2022, Kelurahan Sidorame Barat I sudah dikatakan mandiri, dalam arti mampu mengelola daerahnya untuk meningkatkan sumber dana kelurahannya, yang secara tidak langsung kegiatan perekonomian daerah tersebut juga akan meningkat. Secara keseluruhan terbukti bahwa Kelurahan Sidorame Barat I sangat efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

## 2. Analisis Efisiensi

Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan selalu naik, alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Namun demikian, pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Efisiensi lebih menitik beratkan pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan menggunakan sumber daya yang lebih hemat. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemampuan organisasi untuk menggunakan sejumlah sumber daya tertentu untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Begitu juga yang terjadi pada Kelurahan Sidorame Barat I, tingkat efisiensi mengalami fluktuasi dan penurunan seiring dengan kondisi pemerintahan, adapun tingkat efisiensi selama tahun penelitian Kelurahan Sidorame Barat I dapat dilihat pada tabel 4.3



$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2016

Tahun 2021

$$\text{Belanja Tahun 2021} = \frac{\text{Rp.1.992.314.216}}{\text{Rp.1.109.734.737}} \times 100\% = 179,53\%$$

Tahun 2022

$$\text{Belanja Tahun 2022} = \frac{\text{Rp.866.604.922}}{\text{Rp.460.407.074}} \times 100\% = 188,22\%$$

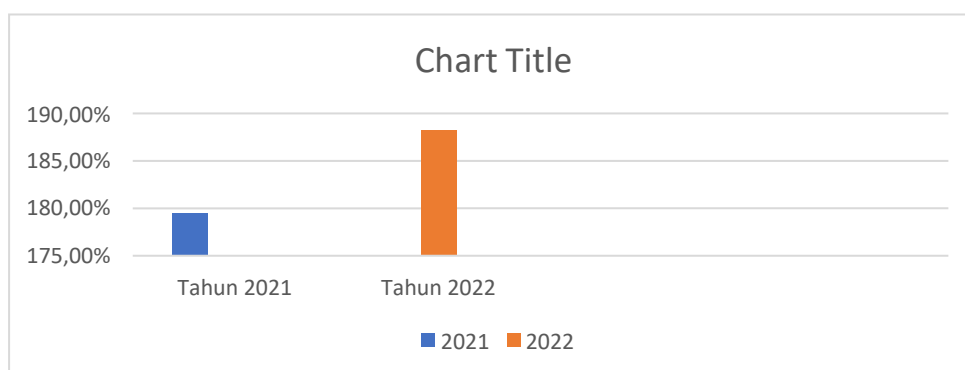
**Tabel 4.4**

Perkembangan Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kelurahan Sidorame Barat I Selama Tahun Anggaran 2021-2022.

Tahun	Keterangan	Realisasi	Anggaran	Efisiensi (%)	Keterangan
2021	Belanja Keseluruhan	Rp. 882.579.479	Rp. 1.109.734.737	179,53%	Tidak Efisien
2022	Belanja Keseluruhan	Rp. 265.508.925	Rp. 314.660.000	188,22%	Tidak Efisien

Sumber : Data sekunder diolah penulis, 2023

Kenaikan/Penurunan Tingkat Efisiensi Kelurahan Sidorame Barat I Tahun Anggaran 2021-2022



**Gambar 4.2**

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Kelurahan Sidorame Barat I pada tahun 2021 belanja memiliki tingkat efisiensi sebesar 179,53%, kemudian pada tahun 2022 belanja mengalami kenaikan tingkat efisiensi yaitu sebesar 188,22%

mengalami kenaikan sebesar sebesar 8,69% dari tahun 2021 belanja sebelumnya. Pada tahun Semakin besar nilai efisiensi yang mendekati angka 100% atau lebih dari 100% menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang baik dengan indikasi adanya kecenderungan pemborosan anggaran. Untuk tahun 2021-2022 Kelurahan Sidorame Barat I mengalami kenaikan tingkat efisiensi hasil ini menunjukkan bahwa Kelurahan Sidorame Barat I dalam mengelola anggaran belanja daerah dari tahun 2021-2022 memperbaiki kinerjanya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah semakin baik. Pada tahun 2022 belanja pemberdayaan masyarakat terjadi peningkatan efisiensi, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut Kelurahan Sidorame Barat I banyak mengalokasikan anggaran belanja untuk belanja modal, yaitu dalam bentuk pembangunan infrastruktur, sehingga anggaran belanja daerah masih mengalami defisit, karena kegiatan perekonomian daerah kurang berkembang, setelah infrastruktur terbangun mulai tahun 2021-2022 menunjukkan bahwa Kelurahan Sidorame Barat I berhasil memanfaatkan anggaran belanja menjadi lebih efisien, karena kegiatan ekonomi pemerintah daerah telah berjalan lancar didukung dengan infrastruktur yang memadai, sehingga secara keseluruhan dari tahun 2021-2022 Kelurahan Sidorame Barat I bisa dikatakan tidak efisien dalam mengelola anggaran keuangan daerah dengan menunjukkan adanya peningkatan tingkat efisiensi yang mengindikasikan telah dilakukan perbaikan kinerja oleh pemerintah.

### **4.3 Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa "Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintahan Di Kelurahan Sidorame Barat I" memberikan peningkatan yang sangat baik di tingkat efektivitas dan tingkat efisien bagi kinerja anggaran pemerintah daerah kurang baik. Dimana anggaran belanja daerah dan realisasi anggaran sangat memperlihatkan hasil yang kurang maksimal di lihat dari hasil uji efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah kelurahan sidorame barat I.

Dari data diatas dapat dilihat dari rata-ratanya sebesar 183,87% menurut kriteria analisis rasio dikatakan sangat efektif dan tidak efeien. Hal ini menunjukkan kesuksesan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan. Yang disebabkan karena faktor sumber daya, faktor structural organisasi, faktor teknologi.

Dari hasil analisis efektivitas kinerja pemerintah Kelurahan Sidorame Barat I memperoleh hasil yaitu pada tahun 2021-2022 memiliki tingkat efektivitas di atas 100%. hasil ini menunjukkan bahwa dalam mengelola anggaran daerah Kelurahan Sidorame Barat I sangat efektif, yaitu tepat pada apa yang telah menjadi target anggaran. selama tahun 2021-2022 anggaran belanja semakin meningkat,dengan nilai efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan 2022. Pada Tahun 2021 memiliki tingkat efektivitas sebesar 179,53%, Tahun 2022 memiliki tingkat efektivitas sebesar 188,22%.

Dari hasil analisis efisiensi kinerja pemerintah Kelurahan Sidorame Barat I memperoleh hasil yaitu berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Kelurahan Sidorame Barat I pada tahun 2021 memiliki tingkat efesiensi sebesar 179,53% dan Pada ahun 2022 memiliki tingkat efesiensi sebesar 188,22%, Dengan hasil akhir yang sangat inggi semakin besar nilai efisiensi yang mendekati angka 100% atau lebih dari 100% menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang baik dengan indikasi adanya kecenderungan pemborosan anggaran. untuk tahun 2021-2022 Kelurahan Sidorame Barat I mengalami penurunan tingkat efisiensi hasil ini menunjukan bahwa Kelurahan Sidorame Barat I dalam mengelola anggaran belanja daerah dari tahun 2021-2022 kurang memperbaiki kinerjanya.

#### **4.3.1 Analisis Penyebab Anggaran Belanja Kurang Efektif dan Kurang Efisien**

Dari hasil analisis yang di lakukan bahwa efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau kebijakan darimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. (Heldawati,2021) Efektivitas terkait antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan antara output dengan tujuan. Adapun faktor penentuan efektif dan efisien :

- (1) faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana
- (2) faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan jabatan baik struktur maupun fungsional
- (3) faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan
- (4) dukunga kepala aparatur dan pelaksanaanya baik pimpinan maupun masyarakat

Dalam penelitian ini dengan rumusan masalah, Bagaimana tingkat efektifitas dan efesiensi pada anggaran dana Kelurahan Sidorame Barat I T.A 2021-2022, hasil data yang di peroleh Pada persentase tabel 4.3 pada umumnya realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah Kelurahan Sidorame Barat I di tahun 2021 sebesar 179,53% dan tahun 2022 sebesar 188,22%

karena menurut kriteria efektivitas 100% keatas dikatakan sangat efektif . Kemudian anailisis efesiensi pada tahun 2021 sebesar 179,53% dikatakan tidak efesiensi dan pada Tahun 2022 sebesar 188,22% dikatakan tidak efesiensi.

Selain pengambilan data laporan anggaran dari tahun 2021-2022 yang menjadi acuan, peneliti juga melakukan wawancara dua orang sekretaris dan bendahara lurah, bahwasanya anggaran kinerja pemerintahan Kelurahan Sidorame Barat I cukup baik dikarenakan pimpinan daerah dan orang- orang yang di dalam yang menjalankan sistem anggaran pemerintah adalah orang-orang yang berpengalaman dan berkompten di dibidangnya. Betul, di katakan pada peneliti terdahulu tentang realisasi anggaran berpengaruh dengan Efektivitas dan efisiensi suatu daerah yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah yaitu fakto personal atau individu, faktor kepemimpinan, faktor Tim, faktor sistem, faktor kontestual, belanja modal,dana perimbangan dan Pendapatan asli daerah (Heldawati,2021).

Dalam Penelitian terdahulu (Sella Ria Purwanti, 2018) Menjelaskan bahwa kinerja pemerintahan Kelurahan Kutoanyar melakukan optimalisasi anggaran secara efesiensi dan efektivitas dalam pengelolaan realisasi anggaran Tahun 2013-2017 sesuai dengan undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah. Tingkat Efektivitas Pengelolaan keuangan di Kelurahan Kutoanyar tahun anggaran 2013-2017 dapat dikatakan efektif yaitu memiliki rasio efektivitas pengelolaan kutoanyar tahun anggaran 2013-2017 dapat dikatakan

efisien yaitu memiliki rata-rata 87,47%. (Heldawati, 2021) menjelaskan bahwa analisis realisasi anggaran efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan Kabupaten Luwu dikatakan baik dikarenakan data-data yang diolah secara sekunder memberikan hasil yang baik pula. (Lince Liling, 2022) menjelaskan bahwa hasil perhitungan anggaran mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan belanja anggaran setiap tahunnya kriteria berjalan cukup efektif. Dikatakan cukup efektif karena berdasarkan perhitungan tahun 2019-2021 memiliki rasio efektivitas rata-rata 99% hal ini dikarenakan masih adanya pemborosan dan tidak teliti dalam mempertimbangkan alokasi keuangan yang ditujukan untuk membiayai pembangunan sehingga pencapaian sasaran masih belum optimal. (Kiky Muryanti, 2015) menjelaskan bahwa perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2011-2015 dapat dikatakan sangat efektif, yaitu dengan memiliki rasio efektivitas rata-rata diatas 100%, sedangkan perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di kabupaten wonogiri selama tahun anggaran 2011-2015 dapat dikatakan efisien.

(Rusmilawati, 2021) menjelaskan bahwa secara keseluruhan hasil perhitungan efektivitas kinerja kantor Kelurahan Di Kecamatan Banjarmasin Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2016-2018 sudah efektif karena hasil yang dicapai 90% keatas. Sedangkan untuk hasil perhitungan efisiensi kinerja kantor Kelurahan Di Kecamatan Banjarmasin Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-202017 sudah sangat efisien karena hasil perhitungan efisiensi tahun 2018 sudah sangat efisien. (Suyatman, 2020) menjelaskan bahwa tahun 2017-2019 tingkat efektivitas pendapatan pada Kelurahan Kasiguncu termasuk pada kategori efektif dimana hasil perbandingan diperoleh sebesar 90%-100%. Dan (Mila Naffa Litauji, 2021) menjelaskan bahwa tingkat dan kriteria efektivitas tahun anggaran 2018-2020 cukup efektif karena penerimaan anggaran yang stabil dengan presentasi 85,64%.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

- a. Kinerja pemerintah Kelurahan Sidorame Barat I tidak melakukan optimalisasi anggaran secara ekonomi, efisien, dan eektivitas dalam pengelolaan realisasi anggaran belanja selama tahun anggaran 2021-2022 dengan ini dikatakan bahwa kinerja instansi pemerintahan di Kelurahan Sidorame Barat I tidak efisien.
- b. Tingkat efektif realisasi anggaran dana Kelurahan Sidorame Barat I T.A 2021-2022 sangat efektif dikarenakan kinerja intansi yang sangat baik dalam ketepatan waktu dalam pengelolaan dana kelurahan, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran dana kelurahan, ketepatan dalam menentukan pilihan
- c. Tingkat efisien belanja dana kelurahan sidorame barat I T.A 2021-2022 dinilai tidak mampu menghemat anggaran belanja dikategorikan tidak efisien, terlihat dari ada angka yang melebihi anggaran belanja tidak mampu menghemat tahun 2021 sebesar 179,53%% dikategorikan tidak efisien , tahun 2022 dikategorikan tidak efisien sebesar 188,22%. Dikarenakan kurangnya faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan kelurahan, faktor sumer daya manusia yang kurang, kurangnya faktor dukungan dalam masyarakat dalam berkegiatan, dan faktor kepemimpinan dalam kemampuan

#### **5.2 Saran**

1. Bagi pemerintah daerah Kelurahan Sidorame Barat I agar belanja yang dikeluarkan dapat lebih efektif dan efisien, maka hal penting yang harus diketahui oleh manajer publik adalah pemahaman tentang konsep belanja, dengan memahami konsep belanja maka perencanaan dan pengendalian pengeluaran daerah menjadi lebih mudah dilakukan. Agar dalam perencanaan sebisa mungkin merasionalkan belanja sehingga belanja yang dikeluarkan dapat lebih efektif dan efisien.
2. Bagi peneliti delanjutnya, agar menjadi acuan dan peneliti menyarankan agar peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti anggaran

belanja langsung setiap tahun dan meneliti tentang proses jalannya program kegiatan dan program kerja anggaran belanja yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan agar menggunakan metode analisis yang lebih bervariasi tidak hanya berdasarkan konsep value for money untuk menganalisis kinerja pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ikhsan. (2016). Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan perpajakan*.
- Asita, Ristia. (2018). Pengertian Kerangka Berpikir. *Jurnal Politik*, Hal 51.
- Astuty, Widia. (2012). Pengaruh Lingkungan Bisnis Terhadap Informasi Akuntansi Manajemen Dan Penganggaran Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis UMSU*, Vol. 11 No. 2.
- Ayuniati, M. D. (2017). Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik. *Yogyakarta: CV*, Hal 56 - 57.
- Bastian. (2006 ). Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD). *Suatu Pengantar, Jakarta: Erlangga*.
- Bastian. (2011). Pengelolaan Realisasi Anggaran Harus Membantu Memutuskan Produk Atau Layanan Jasa. *Jakarta: Salemba Empat*, Hal 51 -52.
- Bastian. (2016). Akuntansi Sektor Publik. *Erlangga, Surabaya*, 297.
- Bastian, I. (2010). Karakteristik Anggaran. *Pengantar Edisi Ketiga*, Hal 166.
- E.P, G. (2011). Penyusunan Dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Hal 9.
- Hafiz, A. (2010). Dimensi Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, Hal 80-81.
- Hanum, Zulia. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis UMSU*, Vol. 11 Hal 3.
- Haruman. (2010). Pengertian Anggaran Sektor Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Hal 6.
- Haryanto. (2007). Pengertian Efisiensi. *Jurnal Ilmu Pengembangan Dan Penerapan*, Hal 6.
- Heldawati. (2021). Fungsi Anggaran Sektor Publik. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Hal 11 - 13.
- Indra. (2006). Enam Aspek Untuk Mengukur Kinerja. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Manajemen*, Hal 276 - 277.
- Kusufi, H. d. (2016). Penyusunan Anggaran . *Jakarta: Salemba Empat*, Hal 52.



- Mahmudi. (2015). Pengertian Indikator Kinerja. *UPP STIM*, Hal 4.
- Mahmudi. (2016). Jenis Anggaran Sektor Publik. *Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN*, Hal 69.
- Makmur. (2011). Mengungkapkan Indikator Efektivitas. *Jurnal Administrasi Publik*, Hal 17 -19 .
- Mardiasmo. (2009). Pengukuran Kinerja Efisiensi. *Jurnal Perpajakan*, Hal 134.
- Mardiasmo. (2010). Pengertian Efisiensi. *Jakarta: Salemba Empat*, Hal 135.
- Mardiasmo. (2013). Pengertian Anggran Sektor Publik. *Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: C.V*, Hal 49.
- Mardiasmo. (2013). Tentang Perpajakan. *Perpajakan*, Hal 63.
- Mardiasmo. (2017). Pengertian Efektivitas ukuran Kinerja berhasil tidaknya pencapaian tujuan. *Jakarta: Salemba Empat*, Hal 74 - 75.
- Moteong. (2017). Pengertian Pendekatan Penelitian Kualitatif .
- Mouzas, M. (2006). Industri Marketing Manajemen . *Jurnal Business Research*.
- Nafarin, M. (2007). Penganggaran Perusahaan. *Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat*, 11.
- Permendagri (2006) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Struktur APBD
- Permendagri (2011) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengertian APBD.
- Permendagri (2013) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Laporan Realisasi Dan Menyajikan Ikhtisar.
- Permendagri (2015) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 Tentan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sinambela, E. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Vol. 18 No. 2.
- Sugiyono. (2019). Pengertian Variabel Bebas. *Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, Hal 69.
- Sugiyono. (2019). Pengertian Variabel Penelitian. *Jurnal Metode Penelitian*, Hal 68.
- Ubar Harahap. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab/Kota Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 11 No. 1
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Yuwono. (2008). Manfaat Sistem Pengukuran Kinerja Yang Baik. *Journal Indonesian of Applied Linguistics*, Hal 29.

## **LAMPIRAN**

### **PROFIL PENELITIAN**

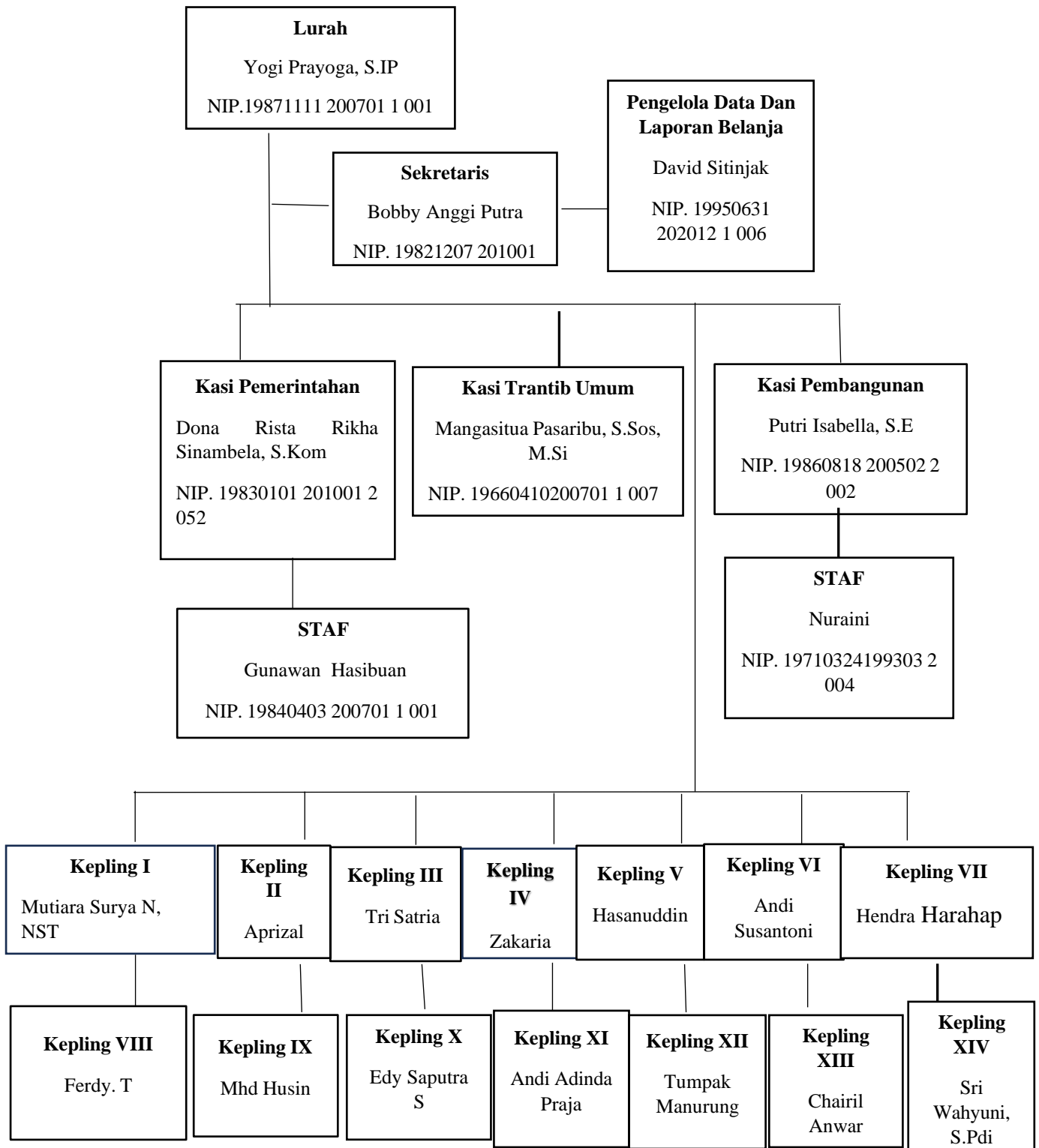
#### **1. Gambaran Umum Kelurahan Sidorame Barat I**

Kelurahan Sidorame Barat I adalah salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Medan Perjuangan kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kelurahan Sidorame Barat I beralamat di Jl. Pelita III Gg. Pepaya No. 9 Medan dengan kode pos 20236 dan luas wilayah 31000 hektar yang terbagi menjadi 14 lingkungan. Dengan kode Kemendagri 12.71.18.1007. Dengan jumlah penduduk 7.428 Jiwa, Jumlah KK 2.227.

Letak geografi Kelurahan Sidorame Barat I memiliki batas wilayah sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Perintis Kecamatan Medan Timur.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sidorame Barat II Medan Perjuangan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur.

## 2. Struktur Organisasi Kelurahan Sidorame Barat I



Gambar 2.2 Struktur Organisasi

Adapun Fungsi jabatan struktur organisasi Kelurahan Sidorame Barat I adalah sebagai berikut :

1. Kepala Lurah

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- c. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

2. Sekretaris

- a. Melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum, meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, humas, dan kearsipan
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran
- d. Penyusunan penetapan kinerja
- e. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public
- f. Pelaksanaan dan pembinaan kepegawaian
- g. Pengelolaan anggaran dan retribusi
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai
- i. Pelaksanaan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan.
- j. Pelaksanaan inventarisasi asset/kekayaan daerah yang ada di kelurahan.
- k. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan

3. Pengelolaan data dan laporan belanja
  - a. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan tugas teknis di bidang data dan pelaporan
  - b. Melaksanakan penyusunan program kerja/kegiatan subbidang data dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  - c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing demi kelancaran tugas
  - d. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
  - e. Melaksanakan pemutakhiran data pelayanan perizinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi keakuratan dan akuntabel laporan.
  
4. Kasi Pemerintahan
  - a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pelaporan di bidang urusan pemerintahan dan pertahanan serta pemberdayaan masyarakat.
  - b. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang pemerintahan
  - c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan.
  
5. Kasi Trantib Umum
  - a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban kelurahan.
  - b. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang ketertiban dan ketentraman umum
  - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk pembinaan perlindungan masyarakat.
  - d. Pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk penanggulangan bencana alam.

- e. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan keamanan swakarsa di kelurahan.

#### 6. Kasi Pembangunan

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data di bidang ekonomi dan pembangunan.
- c. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan.
- d. Pelaksanaan administrasi perekonomian dan pembangunan di kelurahan
- e. Pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana fisik asset pemerintahan kota di lingkungan kelurahan.
- f. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang perekonomian dan pembangunan.

#### 7. Kepling

- a. Sebagai perpanjag tangan lurah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik itu membantu masyarakat untuk pengurusan administrasi di kelurahan maupun terhadap permasalahan lainnya.
- b. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan dengan melakukan Kerjasama sekolah dengan masyarakat dan babin kamtibmas dengan kegiatan siskamling.

## HASIL WAWANCARA

### 1. Wawancara dengan Sekretaris dan Bendahara Lurah.

#### Daftar Wawancara tentang dana anggaran dan efektivitas dan efisiensi di Kelurahan Sidorame Barat I

Nama Responden : Bobby Anggi Putra dan Putri Isabella, S.E

**Tabel 1.2 Hasil Wawancara**

#### Daftar Wawancara Tentang Efektivitas dan Efisiensi di Kelurahan Sidorame Barat I

Responden : Bendahara Lurah

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana tahap pengelolaan dana kelurahan ?	<p>a. Perencanaan : Kelurahan dalam Menyusun perencanaan pembangunan kelurahan harus sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota.</p> <p>Pelaksanaan : Pelaksanaan kegiatan kelurahan (sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat)</p> <p>b. Penatausahaan : Kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara kelurahan. Bendahara kelurahan wajib mempertanggungjawabkan dana melalui laporan pertanggungjawaban.</p> <p>c. Pertanggungjawaban : Membuat laporan pertanggungjawaban kerja disertai dengan laporan keuangan</p>
2.	Berapa hari waktu yang diperlukan dalam menentukan perhitungan biaya anggaran dana kelurahan ?	2-3Hari

3.	Darimana sumber-sumber anggaran dana kelurahan diperoleh ?	Bersumber dari APBD sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemda
4.	Dalam proses penyusunan anggaran siapa saja yang dilibatkan ?	Lurah selaku KPA, PPTK (Penjabat Pelaksana Te.knis Kegiatan) dan BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu)
5.	Siapa saja yang mengesahkan anggaran dana kelurahan ?	Camat selaku PA (Pengguna Anggaran) melalui Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)
6.	Apakah dasar penyusunan anggaran dana kelurahan berdasarkan aturan yang berlaku ?	Iya, penyusunan dana kelurahan harus sesuai aturan yang telah diberlakukan.
7.	Bagaimana menemukan komponen-komponen dalam penyusunan anggaran dana kelurahan ?	Melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) baik tingkat kelurahan dan kecamatan yang dilakukan.

Nama Responden : Sekretaris Lurah

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa penyebab jika realisasi dan anggaran bersisa?	Akan berakibat silva yang dapat ditambahkan anggarkannya di kemudian hari/tahun berikutnya.
2.	Bagaimana faktor dukungan untuk pelaksanaan baik pimpinan maupun masyarakat dalam berkegiatan ?	Dilihat dari apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan melalui kepala lingkungan yang kemudian di sampaikan pada acara musyawarah rencana pembangunan (Musrembang)
3.	Apa saja faktor yang menghambat proses penyusunan anggaran dana kelurahan?	Alokasi anggaran dana kelurahan yang kerap berubah menyebabkan rancangan dana kelurahan yang telah disusun di rubah Kembali
4.	Apakah untuk pengeluaran diperlukan survey harga terlebih dahulu untuk mengetahui perbandingan harga sehingga dapat menentukan harga yang terendah agar tidak terjadi pemborosan?	Iya diperlukan



5.	Bagaimana faktor pimpinan dalam kemampuan untuk mengkombinasikan suatu kegiatan mencapai tujuan yang diinginkan ?	Dilihat dari apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan melalui kepala lingkungan yang kemudian disampaikan pada acara musyawarah rencana pembangunan (Musrembang)
6.	Apakah faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, peralatan kerja sudah tercukupi dalam kelurahan ?	SDM yang diperlukan sudah tercukupi dalam melaksanakan dana kelurahan
7.	Bagaimana bentuk proses pertanggungjawaban kepada masyarakat	Publikasi melalui media social bahwa kegiatan dana kelurahan telah terlaksana dengan baik

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Diah Syafitri  
NPM : 1905170131  
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 16 Agustus 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak Ke : 1 dari dua bersaudara  
Alamat : Jl. Samudera Hindia II Blok DD No. 69  
Griya 3 Martubung  
No. Telephone : 0813-6145-9599  
Email : [syafitridiah120@gmail.com](mailto:syafitridiah120@gmail.com)

### 2. Data Orang Tua

Nama Ayah : Suyadi  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Nama Ibu : Meliana Nasution  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Samudera Hindia II Blok DD No. 69  
Griya 3 Martubung  
No. Telephone : 0813-6690-5922  
Email : su8357721@gmail.com

### 3. Data Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SD Negeri 064011  
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 25 Medan  
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMA Swasta Dharmawangsa Medan

Medan, 3 Juli 2023

(Diah Syafitri)

### REALISASI ANGGARAN DANA KELURAHAN T.A. 2021

Kelurahan SIDORAME BARAT-I  
Kecamatan MEDAN PERJUANGAN

No	Nama Belanja/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
<b>PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA</b>				
1	REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN GG. SETIMPAL	Rp 117.375.175	Rp 97.031.367	
2	REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN JL. GEREJA GG. HALAMAN	Rp 51.902.661	Rp 43.753.866	
3	REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN JL. GEREJA GG. NASIONAL	Rp 124.482.436	Rp 104.574.398	
4	REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN JL. GEREJA GG. PANDAN	Rp 64.721.853	Rp 54.754.914	
5	REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN JL. GEREJA GG. REZEKI	Rp 61.112.375	Rp 51.604.292	
6	REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN JL. NGALENGKO GG. SENGGOL	Rp 38.352.077	Rp 32.463.349	
7	REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN JL. PELITA I GG. PINANG	Rp 64.772.326	Rp 54.805.200	
8	REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN JL. SEJATI GG. THAMRIN	Rp 117.116.018	Rp 100.795.713	
9	REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN JL. SEJATI GG. WASPADA	Rp 52.899.816	Rp 42.490.880	
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN</b>				
1	BELANJA BAHAN LAINNYA (9 Kegiatan)	Rp 300.000.000	Rp 190.302.750	1. Pelatihan Barista 2. Sosialisasi Digital Marketing 3. Sosialisasi Bahaya Narkoba 4. Sosialisasi Siskamling 5. Sosialisasi Pencegahan Stunting 6. Sosialisasi bercocok tanam Hidrogel 7. Pelatihan Papan Bunga 8. Pelatihan Bilal Mayit 9. Pelatihan Tata Rias
2	BELANJA ATK DAN DOKUMENTASI (9 Kegiatan)	Rp 67.000.000	Rp 65.287.750	1. Pelatihan Barista 2. Sosialisasi Digital Marketing 3. Sosialisasi Bahaya Narkoba 4. Sosialisasi Siskamling 5. Sosialisasi Pencegahan Stunting 6. Sosialisasi bercocok tanam Hidrogel 7. Pelatihan Papan Bunga 8. Pelatihan Bilal Mayit 9. Pelatihan Tata Rias

No	Nama Belanja/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
3	BELANJA SOUVENIR/ CENDERAMATA (9 Kegiatan)	Rp 50.000.000	Rp 44.715.000	1. Pelatihan Barista 2. Sosialisasi Digital Marketing 3. Sosialisasi Bahaya Narkoba 4. Sosialisasi Siskaming 5. Sosialisasi Pencegahan Stunting 6. Sosialisasi bercocok tanam Hidrogel 7. Pelatihan Papan Bunga 8. Pelatihan Bilal Mayit 9. Pelatihan Tata Rias

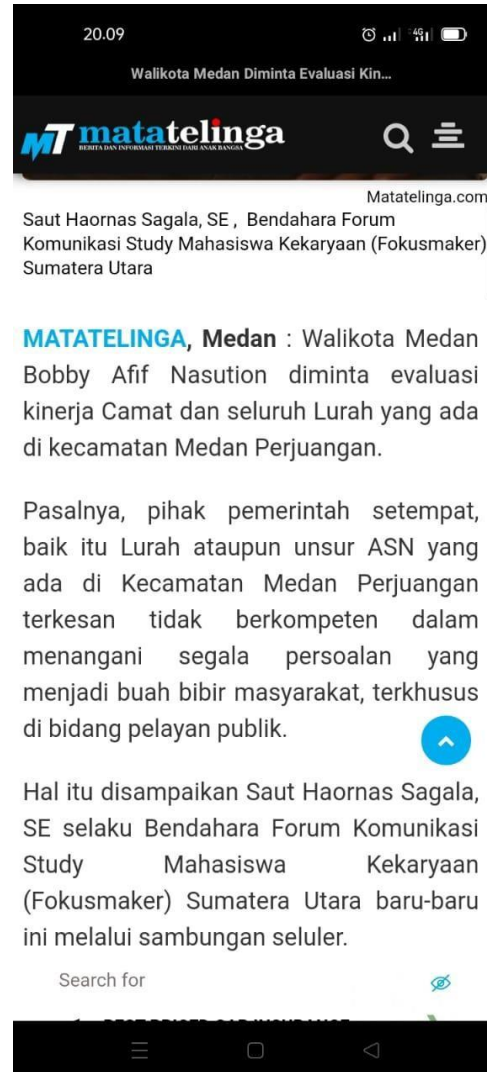


## REALISASI ANGGARAN DANA KELURAHAN T.A. 2022

Kelurahan SIDORAME BARAT-I  
Kecamatan MEDAN PERJUANGAN

No	Nama Belanja/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
<b>PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA</b>				
1	REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN GANG THAMRIN	Rp 145.310.000	Rp 115.480.925	
2	REHABILITASI DRAINASE LINGKUNGAN GANG PEPAYA	Rp 169.350.000	Rp 150.028.000	
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN</b>				
1	PELATIHAN TATA BOGA	Rp 66.516.000	Rp 66.130.223	
2	SOSIALISASI TENTANG HUKUM	Rp 17.580.000	Rp 12.935.940	
3	BELANJA PERLENGKAPAN POSYANDU	Rp 61.651.074	Rp 61.622.760	







Menurutnya, Camat memiliki tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh Walikota Medan Bobby Nasution dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan dalam segi birokrasi, seperti pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan. Tetapi, Pihak Pemerintah setempat dalam memberikan pelayanan publik terkesan tidak profesional. "Kita kan bisa lihat sendiri, seharusnya sebagai pejabat pemerintahan, mereka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sama dengan Lurah yang ada di kecamatan Medan Perjuangan ini". Ujarnya.

Lebih jauh dikatakannya, bahwa terkait dengan isi pemberitaan yang baru-baru ini disampaikan oleh media online, adanya aparaturnegara yang terkesan bungkam saat di diwawancarai oleh media



yang ada di kecamatan Medan Perjuangan ini". Ujarnya.

Lebih jauh dikatakannya, bahwa terkait dengan isi pemberitaan yang baru-baru ini disampaikan oleh media online, adanya aparaturnegara yang terkesan bungkam saat di diwawancarai oleh media, mengenai persoalan SIMB. Saut menganggap ketidak profesionalan Pemerintah setempat di bidang pelayanan publik. "Wartawan itu kan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik, agar masyarakat yang baca tau, bagaimana sikap Pemerintah apabila ada masalah di Wilayah kerjanya. Bukan malah diam membisu". Katanya

Halaman : [1](#) [2](#) [Semua](#)

Penulis : Kos  
Editor : Putra





Menurutnya, Camat memiliki tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh Walikota Medan Bobby Nasution dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan dalam segi birokrasi, seperti pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan. Tetapi, Pihak Pemerintah setempat dalam memberikan pelayanan publik terkesan tidak profesional. "Kita kan bisa lihat sendiri, seharusnya sebagai pejabat pemerintahan, mereka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sama dengan Lurah-lurah yang ada di kecamatan Medan Perjuangan ini". Ujarnya.

Lebih jauh dikatakannya, bahwa terkait dengan isi pemberitaan yang baru-baru ini disampaikan oleh media online, adanya aparaturnya yang terkesan bungkam saat di diwawancarai oleh media,



Menurutnya, Camat memiliki tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh Walikota Medan Bobby Nasution dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan dalam segi birokrasi, seperti pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan. Tetapi, Pihak Pemerintah setempat dalam memberikan pelayanan publik terkesan tidak profesional. "Kita kan bisa lihat sendiri, seharusnya sebagai pejabat pemerintahan, mereka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sama dengan Lurah-lurah yang ada di kecamatan Medan Perjuangan ini". Ujarnya.

Lebih jauh dikatakannya, bahwa terkait dengan isi pemberitaan yang baru-baru ini disampaikan oleh media online, adanya aparaturnya yang terkesan bungkam saat di diwawancarai oleh media,





Lebih jauh dikatakannya, bahwa terkait dengan isi pemberitaan yang baru-baru ini disampaikan oleh media online, adanya aparaturnegara yang terkesan bungkam saat di diwawancarai oleh media, mengenai persoalan SIMB. Saut menganggap ketidak profesionalan Pemerintah setempat di bidang pelayanan publik. "Wartawan itu kan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik, agar masyarakat yang baca tau, bagaimana sikap Pemerintah apabila ada masalah di Wilayah kerjanya. Bukan malah diam membisu". Katanya

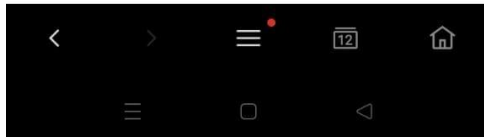
Sambungnyalagi, yang menjadi acuan perlunya di evaluasi kinerja Pemerintah setempat melihat dari Track Record yang sudah ada selama menjabat, terkhusus kepada Camat Medan Perjuangan, dimana Camat Medan Perjuangan pernah viral terkait pengusiran para mahasiswa yang



Sambungnyalagi, yang menjadi acuan perlunya di evaluasi kinerja Pemerintah setempat melihat dari Track Record yang sudah ada selama menjabat, terkhusus kepada Camat Medan Perjuangan, dimana Camat Medan Perjuangan pernah viral terkait pengusiran para mahasiswa yang menjalankan aksi damai di kantornya beberapa bulan yang lalu, begitu juga dengan tindakan pelayanan, jika pemerintah Kecamatan dan lurah yang ada di wilayah kerja masing-masing enggan beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Terlebih kepada para tokoh-tokoh pemuda guna menjalin kerjasama. "Seperti yang kita ketahui, pemerintah setempat ataupun itu Lurah, setidaknya kan bisa bersosialisasi dan temu ramah. Agar bekerja dalam meningkatkan pembangunan di Kelurahan yang ada disetiap Kecamatan bersama-sama dengan tokoh-tokoh pemuda. Sama halnya dengan Camat, perlu membangun

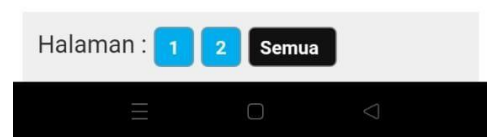


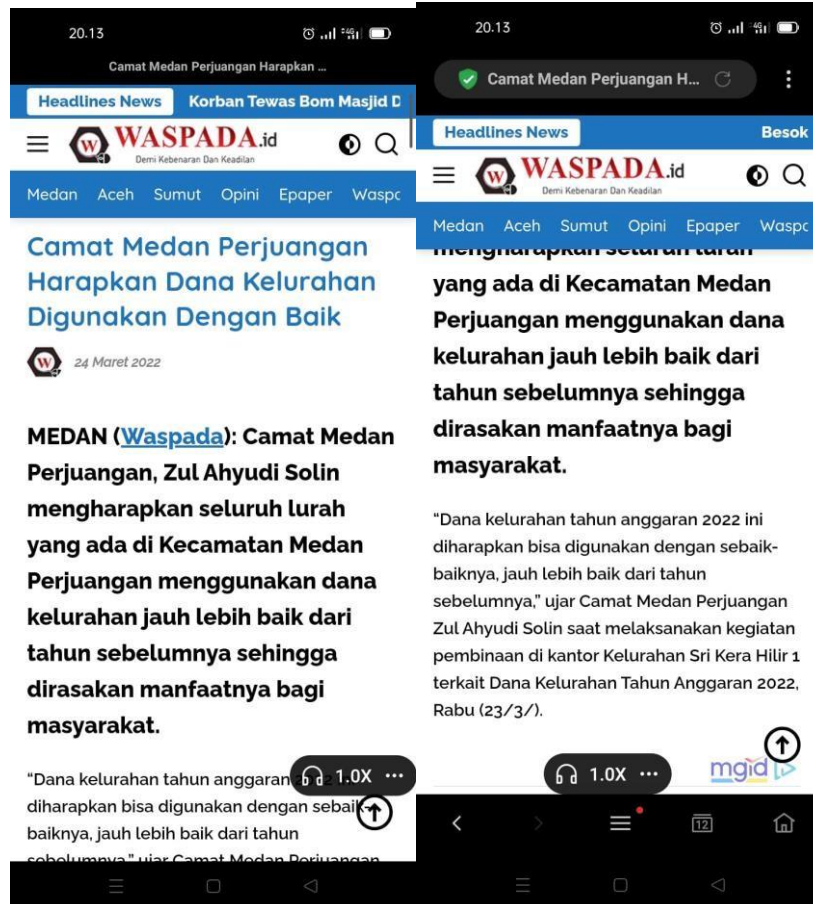
ada di wilayah kerja masing-masing enggan beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Terlebih kepada para tokoh-tokoh pemuda guna menjalin kerjasama. "Seperti yang kita ketahui, pemerintah setempat ataupun itu Lurah, setidaknya kan bisa bersosialisasi dan temu ramah. Agar bekerja dalam meningkatkan pembangunan di Kelurahan yang ada disetiap Kecamatan bersama-sama dengan tokoh-tokoh pemuda. Sama halnya dengan Camat, perlu membangun komunikasi yang baik, sehingga cepat merespon apa yang menjadi keluhan dalam bermasyarakat, bukan malah menghindar. Kalau menghindar, dimana letak pelayanan publik yang prima itu?".  
Jelasnya

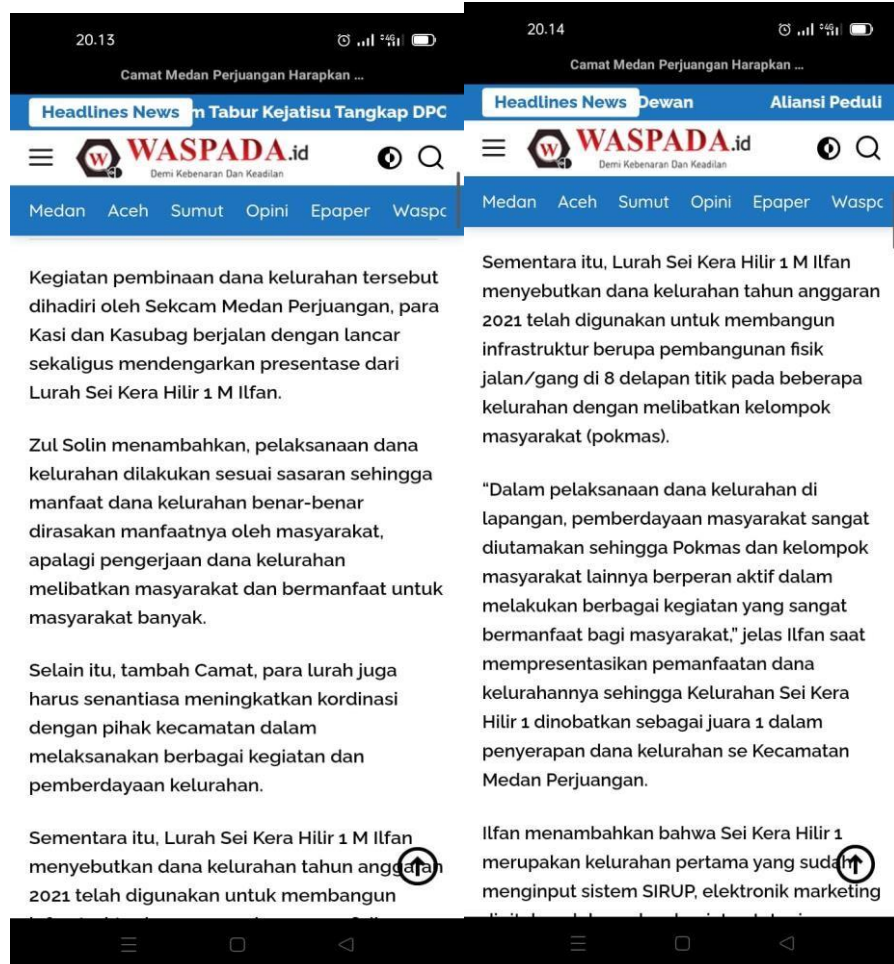


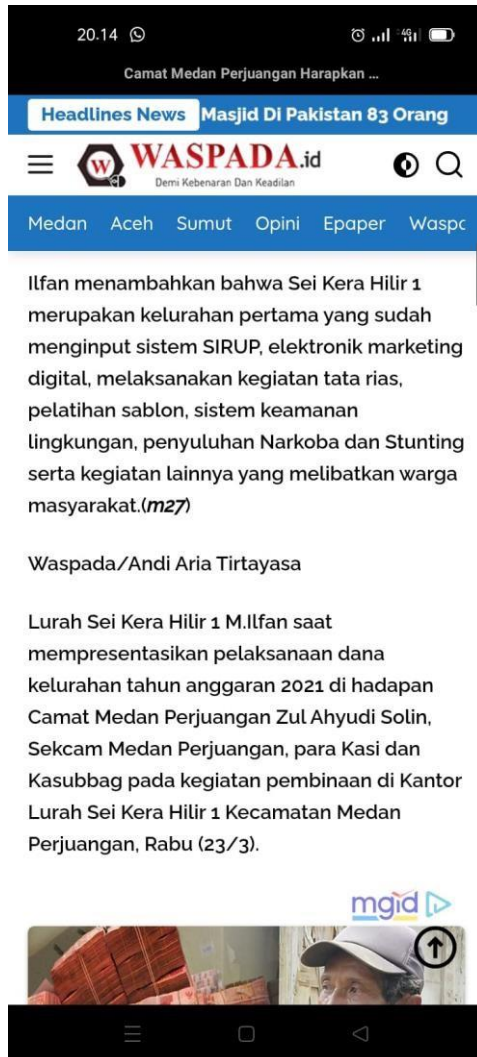
Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, pihak pemerintah setempat baik itu kecamatan maupun Kelurahan enggan memberikan keterangan kepada awak media, ketika wartawan mencoba mengkonfirmasi perihal permasalahan SIMB pada bangunan yang berdiri di kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. dan seakan-akan tidak adanya kemitraan antara Pers dengan Pemerintah dalam pelayanan publik.

Bahkan, lebih parahnyalagi, salah seorang Lurah yang ada diKecamatan Medan Perjuangan malah memblokir Nomor kontak wartawan, sehingga terkesan seperti alergi terhadap wartawan, dan disinyalir, mencoba menutupi sejumlah permasalahan yang ada di Lingkaran Pemerintahan Kelurahan.(Kos/Mtc)















**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/03/12/2022

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 03/12/2022

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Diah Syafitri  
NPM : 1905170131  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

**Identifikasi Masalah** : Adanya kelemahan sistem pengendalian intern yang ditemukan badan pemeriksa keuangan, Realisasi belanja daerah pada pemerintah tidak selalu mencapai target atau anggaran yang telah dianggarkan, Tidak efektifnya anggaran sebagai alat pengendalian pada retribusi daerah

**Rencana Judul** : 1. Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintahan  
2. Analisis fungsi anggaran sebagai alat pengawasan biaya administrasi dan umum  
3. Analisis anggaran sebagai alat pengendalian pendapatan asli daerah

**Objek/Lokasi Penelitian** : Kelurahan Besar Martubung

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Diah Syafitri)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/03/12/2022

Nama Mahasiswa	: Diah Syafitri
NPM	: 1905170131
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul	: 03/12/2022
Nama Dosen pembimbing <sup>*)</sup>	: Dr. Widia Astuty, SE., M.Si., QIA., Ak., CA., CPA (27 Desember 2022)
Judul Disetujui <sup>**)</sup>	: Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Kelurahan Sidorame Barat I

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, 01 Februari 2023  
Dosen Pembimbing

  
Dr. Widia Astuty, SE., M.Si., QIA., Ak., CA., CPA

**Keterangan**  
\*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi  
\*\*) Diisi oleh Dosen Pembimbing  
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi".

Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.  
2 dari 2 halaman

Halaman ke





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PTNU/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [f/umsu](#) [u/umsu](#) [umsu](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 307/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2023**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :  
 Program Studi : Akuntansi  
 Pada Tanggal : 01 Februari 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Diah Syafitri  
 N P M : 1905170131  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Proposal / Skripsi : Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Kelurahan Sidorame Barat I

Dosen Pembimbing : **Dr. Widia Astuty, SE., M.Si., QIA., Ak., CA., CPA**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 07 Februari 2024**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
 Pada Tanggal : 16 Rajab 1444 H  
 07 Februari 2023 M

  
 Dekan  
**Dinda Januri., SE., MM., M.Si**  
 NIDN : 0109086502

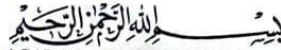


**Tembusan :**  
 1. Peringgal





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : DIAH SYAFITRI  
N P M : 1905170131  
Dosen Pembimbing : Dr. WIDIA ASTUTY S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., QIA  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Penelitian : ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI KINERJA PEMERINTAH DI KELURAHAN SIDORAME BARAT I.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Konsultasi judul. Lengkap data dan penelitian terdahulu yang relevan.	27/1-2023	[Signature]
Bab 2	Lengkap teori. Lengkap bagian diuraikan dengan jelas.	24/1-2023	[Signature]
Bab 3	Lengkap metode penelitian. Tambahkan kisi-kisi wawancara.	1/2-2023	[Signature]
Daftar Pustaka	Tambahkan daftar pustaka.	18/2-2023	[Signature]
Persetujuan Seminar Proposal	Selesai bimbingan proposal	11/3-2023	[Signature]

Dosen Pembimbing Skripsi  
[Signature]  
(Dr. Widia Astuty S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., QIA)

Medan, 10 Maret 2023  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi  
[Signature]  
(Dr. Zulia Hanum., SE., M.Si.)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

**BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Rabu, 29 Maret 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Diah Syafitri*  
NPM. : 1905170131  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 16 Agustus 2001  
Alamat Rumah : Jl. H M Said No. 5 Medan  
Judul Proposal : Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintahan Di Kelurahan Sidorame Barat I

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	- Masalah penelitian hrs didukung Teori. - Rumusan masalah dan tujuan penelitian.
Bab II	- Penelitian terdahulu - Kerangka konseptual & perjelasan
Bab III	.....
Lainnya	.....
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 29 Maret 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Widia Astuty, SE., M.Si., Ak., CA., CPA.,  
QIA

Pembimbing

Elizar Sinambela, SE., M.Si





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 29 Maret 2023* menerangkan bahwa:

Nama : Diah Syafitri  
NPM : 1905170131  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 16 Agustus 2001  
Alamat Rumah : Jl. H M Said No. 5 Medan  
Judul Proposal : Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintahan Di Kelurahan Sidorame Barat I

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Dr. Widia Astuty, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., QIA*

Medan, 29 Maret 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Widia Astuty, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., QIA

Pembanding

Elizar Sinambela, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE. M.Si  
NIDN : 0105087601



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 305/II.3-AU/UMSU-05/F/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 16 Rajab 1444 H  
07 Februari 2023 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan  
Jln. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Diah Syafitri  
Npm : 1905170131  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VII (Tujuh)  
Judul Skripsi : Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Kelurahan Sidorame Barat I

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :  
1. Pertinggal



Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si  
NIDN : 0109086502





## PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112  
E-mail : [brida@pemkomedan.go.id](mailto:brida@pemkomedan.go.id) Website : [www.brida.pemkomedan.go.id](http://www.brida.pemkomedan.go.id)

### SURAT KETERANGAN RISET

NOMOR : 070/217/BRIDA/2023

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 305/II.3-AU/UMSU-05/F/2023. Tanggal: 07 Februari 2023. Hal: Izin Riset Pendahuluan.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan dengan ini memberikan Surat Keterangan Riset kepada :

Nama : Diah Syafitri.  
NPM : 1905170131.  
Program Studi : Akuntansi.  
Lokasi : Kelurahan Sidorame Barat I Kota Medan.  
Judul : "Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Kelurahan Sidorame Barat I".  
Lamanya : 3 (tiga) bulan.  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk soft copy atau melalui Email ([bridamedan@gmail.com](mailto:bridamedan@gmail.com)).
5. Surat keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan  
Pada Tanggal : 10 Februari 2023

a.n. BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA MEDAN  
Sekretaris,



**Tembusan :**

1. Wali Kota Medan (sebagai Laporan).
2. Camat Medan Perjuangan Kota Medan.
3. Lurah Sidorame Barat I Kota Medan.
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Arsip.





**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN**  
**KELURAHAN SIDORAME BARAT-I**  
 JL. Pelita III Gg. Pepaya No. 9 Medan 20236

Medan, 28 Februari 2023

Nomor : 39/SB-1/III/2023  
 Lamp : 3 (tiga) lembar  
 Hal : Pemberian Data

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
 di –  
Medan

Dengan hormat,

1. Menindaklanjuti Surat Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor: 070/217/BRIDA/2023 tanggal 10 Februari 2023 perihal Surat Keterangan Izin Riset An. **DIAH SYAFITRI, NIM: 1905170131, Judul Penelitian : “Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah di Kelurahan Sidorame Barat-I “**
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka bersama ini kami sampaikan Data Realisasi Anggaran Dana Kelurahan (Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat) di Kelurahan Sidorame Barat-I Kec. Medan Perjuangan T.A. 2021 dan T.A. 2022 (*Data terlampir*)
3. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

  
**YOGH PRAYOGA, S.P**  
**PENATA T.K. I**  
**NIP. 19871111 200701 1 001**



**UMSU**  
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Kepada Yth.  
 Bapak Dekan  
 Fakultas Ekonomi  
 Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

## PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 6 Februari 2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : DIAH SYAFITRI  
 NPM : 1905170131  
 Tempat/Tgl Lahir : MEDAN. 16 AGUSTUS 2001  
 Program Studi : Akuntansi  
 Alamat Mahasiswa : JALAN HM SAID NO.5 MEDAN  
 PERJUANGAN  
 Tempat Penelitian: KANTOR BALITBANG KOTA  
 MEDAN  
 Alamat Penelitian : JL KAPTEN MAULANA LUBIS  
 NO.2 PETISAH TENGAH

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :  
 Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam  
 Pemohon

  
 ( Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum S.E.M.Si )

  
 ( Diah Syafitri )